



# LAPORAN TAHUN 2021

## TFCA KALIMANTAN



*Lutung Sentarum*  
(*Presbytis chrysomelas ssp. Cruciger*)

# LAPORAN TAHUN 2021

## TFCA KALIMANTAN



## Hutan, Ekosistem, dan Keanekeragaman Hayati Terlindungi



### Pelepasliaran dan Rescue 136 satwa liar

diantaranya orangutan, badak sumatra, kelempiau, rangkong/kangkareng hitam, dan bangau tong-tong



### Investigasi peredaran satwa liar di Kalimantan Barat

dengan temuan 137 kejadian dan 16 kasus peredaran illegal satwa liar telah masuk pengadilan dengan putusan hukum



### Penyediaan data identifikasi dan inventarisasi, serta konservasi habitat 11 Spesies kunci:

Orangutan, Rangkong, Badak Sumatra, Arwana, Pesut, Gajah, Banteng, Bekantan, Langur Borneo, Buaya Badas dan Bangau Storm

## Menguatnya Praktik Mitigasi Perubahan Iklim

### 940.81 ha area direhabilitasi

dengan pengkayaan tanaman



### 572.062,23 ha luas Hutan terlindungi

melalui 6 skema legalitas formal perlindungan

### 7 aksi mitigasi:

Penanaman / pengkayaan lahan, pengamanan kawasan, pencegahan kebakaran hutan, pengaturan tata guna lahan, pengajuan legalitas kawasan, pengomposan, instalasi panel surya



## Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Hutan



111 jenis produk HHBK dan 19 site ekowisata telah dikembangkan



4.580 orang masyarakat terlibat dalam inisiatif ekonomi



## Perbaikan Tata Kelola Sektor Kehutanan dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati



### 172 artikel

terkait proyek diterbitkan oleh media online dan offline, dan 5 buku pembelajaran terkait proyek terbit



### 136.509 orang & 158 Kelompok masyarakat Meningkat kapasitasnya

melalui pendampingan dan berbagai pelatihan seperti teknik survei tumbuhan dan satwa liar, pelatihan agroforestri, pelatihan pembibitan dan rehabilitasi dsb.



### 2 Film Pembelajaran

"Ekspedisi Penelitian Karst Sangkulirang-Mangkalihat 2016".  
"Harapan Baru Rangkong Gading"



### 67 LSM/KSM

mampu menjalankan proyek konservasi dengan baik.



### 165 Kebijakan

difasilitasi untuk mendukung pengelolaan SDA yang berkelanjutan.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME. Atas kehendak dan karunia-Nya, administrator TFCA Kalimantan diberikan kesempatan kembali untuk mempublikasikan Laporan Tahun 2021. Sedikit penyesuaian dari laporan sebelumnya, penyusunan bab laporan ini terdiri dari tujuh bab: pengelolaan program (*governance*); administrasi hibah; pemantauan dan evaluasi; perkembangan dan capaian program; dinamika, tantangan, dan strategi intervensi; serta rencana kerja 2022.

Dalam 2021, dengan disetujuinya hibah siklus 5 bagi 26 lembaga, maka mitra TFCA Kalimantan total berjumlah 80 lembaga, dimana sebagian besar mitra telah menyelesaikan kerjasamanya. Menindaklanjuti rekomendasi dewan pengawas, administrator telah melakukan proses siklus 6, namun karena belum adanya kesepakatan para pihak, proses siklus 6 tidak dilanjutkan. Hingga akhir 2021 masih dilakukan komunikasi antara pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian LHK dengan pihak pemerintah Amerika, untuk mencari mekanisme yang dapat diselesaikan agar sisa hibah TFCA Kalimantan masih dapat digunakan sesuai tujuan.

Penegasan komitmen administrator dalam memfasilitasi 39 mitra dilakukan melalui komunikasi intensif yang sebagian besar berupa pertemuan virtual, khususnya dalam rangka penyusunan laporan penyelesaian kerjasama, proses perpanjangan waktu Kerjasama, serta kajian laporan kegiatan mitra. Selain itu telah dilanjutkan Kerjasama dengan Pokja PKHB sebagai TAP Berau dan fasilitator kabupaten untuk menguatkan kapasitas mitra setempat. Koordinasi dan sosialisasi program juga dilanjutkan kepada Pemda di kabupaten Sasaran, pengadaan konsultan untuk penghitungan kontribusi mitra pada target penurunan emisi PKHB; memfasilitasi kegiatan audit bagi 4 mitra penerima hibah skala kecil, serta mendukung P3E Kalimantan dalam melakukan kajian Daya Dukung Daya Tamping Lingkungan Hidup di 3 kabupaten.

Terima kasih kepada Dewan Pengawas dan Tim Teknis, serta semua mitra yang telah melaksanakan program TFCA Kalimantan, semoga hasil kegiatan tersebut dapat menjadi sumbangsih penting untuk konservasi keanekaragaman hayati, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Kalimantan, khususnya di lokasi kegiatan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam Lestari,

Direktur Program TFCA Kalimantan

Puspa Dewi Liman

## EXECUTIVE SUMMARY

TFCA Kalimantan is the second DNS (Debt for Nature Swap) partnership between the Government of Indonesia (Gol) and the Government of United States of America (USA), with The Nature Conservancy (TNC) and World Wildlife Fund for Nature (WWF) foundation as the swap partners. KEHATI foundation has been appointed as the administrator for TFCA Kalimantan. The TFCA Kalimantan program works to support The Berau Forest Carbon Program (BFCP) and the Heart of Borneo (HoB) initiative at four target districts; Kapuas Hulu, Berau, Kutai Barat, and Mahakam Ulu; to protect globally significant biodiversity, to improve the livelihood of communities surrounding the forest, to reduce greenhouse gas emissions (GHG), and exchange the ideas and experiences related to forest conservation and Reduction Emission from Forest Degradation and Deforestation (REDD+).

As part of the transparency and accountability principles in the program management, administrator publish the 2021 TFCA Kalimantan report, which contains 7 topics; (1) Introduction, (2) Governance, (3) Grant Management, (4) Monitoring and Evaluation, (5) The Progress and Achievements of Program, (6) The Dynamics, Challenges and Intervention Strategies, and (7) Work Plans of 2021. Some highlighted issues included at these chapters are: discussion on TFCA Governance and continuation; contract for 5th cycle and grant status, TAP, grantee's consortium problem and fraud, program achievements, and financial update.

After 10 years Gol participation under TFCA agreement elapsed on September 29 2021, it's interpreted that LHK participation on TFCA Kalimantan Oversight Committee (OC) also ended. There is no more participation LHK in OC Meeting after September 2021. OC has agreed that there is no objection with LHK participation beyond on agreement time, but until Desember 2021 this is a subject of negotiation, still. The matter has uncleared since there is no decision of LHK for TFCA direction and it has impacted to the continuation of TFCA Kalimantan. This is a main subject for 2022 coordination.

OC has agreed for administrator to contract of 26 grantees' with Rp72.681.883.057 (USD 5,082,649), - total budget. During April – Juli all of contract has been signed and made of first disbursement. Refresment discussion of grant management with all of grantee's has been conducted with new additional materi on how to measure institution capacity and its performance using Peranti and PSDABM tools.

Line up with grantees contract, administrator has deal with Pokja PKHB for its services as TAP Berau under over years contract to strengthen 10 grantees capacity and its accompanion community. In Kapuas Hulu to tightening grantee's coordination, district facilitator opens new office as it before hanging on WWF Office.

Up to December 2021 except of Konphalindo-DIAL which has a problem with its internal consorsium and financial fraud, all of grant disbursment resulted field activities. Some of delay activities is still under monitor by administrator for few reasons such as lack of capacity and unmentored in accordance with emptiness of Kutai Barat – Mahakam Ulu facilitator, technical issue for field and budget adjustment, and covid 19. These matters are subject for deal by administrator in 2022.

Several achievements of grantees contributing on program outcome, milestones, and result chain are: (1) Pokja Pesisir propose 1,137.4 hectares area allocated in Coastal Spatial Planning in Balikpapan Bay to be Coastal Conservation Area; (2) Supported by grantee's, Customary Forest Owner in Sungai Utik and Sahan Village start/continue its economic initiative with Buah Mawang and Tengkawang; (3) PRCF has negotiated with Capital Lestari to adjust benchmarking standart of carbon initiative from Plan Vivo into CCB in accordance with MoEF concern to halt all of carbon payment in social forestry area; (4) Some of policies initiative at local level has guarantee grantee's initiative continues after project ended such as 70 million village budget support from Sidobangen Village Government to finalized land use planning agenda proposed by Makmur Jaya 2.

By the end of 2021, of 80 TFCA Kalimantan grantee's, 47 projects have been closed out, and 33 projects is under the contract still with 6 among of them is under go the close out process. With Rp72.681.883.057, - (USD 5,082,649) cycle 5 additional commitment budget, total grant commitment of TFCA become Rp244.176.512.430,- (USD 17,075,280). The 2021 disbursement is Rp31.138.876.008,- (US\$ 2,177,543) from 177.687.821.058,- (US\$ 12,425,721) of total.

At September 2019, Government of Indonesia (Gol) has completed its total debt payment of USD 28.495.384,-. The approved Management Expenses (ME) for 2021 was IDR 7,541,708,175,- (\$523,984,-). Total expenditure in 2021 was 74% from the approved ME or IDR 5,436,105,739,- (\$388,687,-). As part of Yayasan KEHATI audit, 2020 audit report is conducted by (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF Accountants & business advisers) with the process is still under go.

## DAFTAR ISI

<b>TFCA KALIMANTAN DALAM ANGKA 2021</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR</b>	iv
<b>EXECUTIVE SUMMARY</b>	v
<b>DAFTAR ISI</b>	vii
<b>DAFTAR TABEL</b>	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	ix
<b>DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN</b>	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	1
1.1. Latar Belakang Program	1
1.1. Struktur Laporan	2
<b>BAB II. PENGELOLAAN PROGRAM (<i>GOVERNANCE</i>)</b>	3
2.1. Perencanaan dan Pelaporan	3
2.2. Koordinasi dan Konsultasi	3
2.3. Peningkatan Kapasitas	8
2.4. Komunikasi dan Publikasi	8
2.5. Jasa Profesional ( <i>Professional Services</i> )	11
2.6. Eksternal Evaluator	11
2.7. TAP	12
2.8. Administrasi dan Keuangan	15
<b>BAB III. ADMINISTRASI HIBAH</b>	18
3.1. Siklus Hibah	19
3.1.1. Siklus 2-4	19
3.1.2. Siklus 5	19
3.1.3. Siklus 6	20
3.2. Penyaluran dan Status Mitra	20
<b>BAB IV. PEMANTAUAN DAN EVALUASI</b>	25
<b>BAB V. PERKEMBANGAN DAN CAPAIAN PROGRAM</b>	29
5.1. Capaian Indikator dan Milestone Program TFCA Kalimantan	29
5.1.1. Capaian Indikator Program	29
5.1.2. Capaian Milestone Program	39
5.2. Analisis Capaian Indikator dan Milestone Program TFCA Kalimantan	43
5.2.1. Kontribusi Capaian Indikator Pada Program HoB dan PKHB	43
5.2.2. Analisa <i>Result Chain</i> Program	46
<b>BAB VI. DINAMIKA, TANTANGAN, DAN STRATEGI INTERVENSI</b>	59
<b>BAB VII. RENCANA KERJA 2022</b>	63
<b>LAMPIRAN</b>	Matrik Hasil Pelaksanaan/Perkembangan Proyek Mitra Tfca Kalimantan

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Informasi penyaluran dana hibah TFCA Kalimantan .....	201
Tabel 2. Status mitra TFCA Kalimantan hingga Desember 2021.....	21
Tabel 3. Skema perlindungan hutan dan ekosistem .....	30
Tabel 4. Tipe ekosistem dilindungi .....	32
Tabel 5. Jumlah dan jenis kebijakan yang dihasilkan dan/atau disempurnakan hingga 2021 ....	37
Tabel 6. Rencana Kerja Administrator TFCA Kalimantan 2022 .....	63

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Status rekening Trust Fund per November 2021 .....	15
Gambar 2. Kontribusi capaian mitra TFCA Kalimantan pada SDGs.....	27
Gambar 3. Persentase skema perlindungan hutan dan ekosistem dengan capaian legal formal sampai dengan 2021.....	31
Gambar 4. Persentase tipe hutan dan ekosistem dilindungi dengan capaian legal formal perlindungan sampai dengan 2021.....	33
Gambar 5. Skema intervensi penyelamatan 11 jenis Satwa Liar Flagship.....	34
Gambar 6. Jumlah dan klaster jenis produk ekonomi yang dikembangkan .....	35
Gambar 7. Jumlah dan jenis kebijakan yang dihasilkan dan/atau disempurnakan .....	38
Gambar 8. Jumlah dan sektor kebijakan yang dihasilkan dan/atau disempurnakan .....	39
Gambar 9. Persentase kategori isu artikel terkait proyek yg dipublikasikan oleh media.....	41
Gambar 10. Kontribusi capain program TFCA untuk program HoB dan PKHB.....	44

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

APDS	: Asosiasi Periau Danau Sentarum	KKP3K	: Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Bappeda	: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
BBTNBKDS	: Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum	KSDAE	: Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
BKSDA	: Balai Konservasi Sumberdaya Alam	OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
BP2H-LHK	: Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PERANTI	: Perangkat Penilaian Mandiri Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Nirlaba
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan	Pokjanas	: Kelompok Kerja Nasional
BPPMD	: Badan Perizinan dan Penanaman Modal	PMP	: Performance Monitoring Plan
BPSKL	: Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	PPP	: <i>Public Private Partnership</i>
COP DAS	: <i>Conference of the Parties</i> Daerah Aliran Sungai	PS PSDABM	: Perhutanan Sosial Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat
Ditjen	: Direktorat Jenderal	PSKL	: Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
ESDM	Energi dan Sumberdaya Mineral	RAD	: Rencana Aksi Daerah
GCR	: Grand Close Out Report	REDD+	: <i>Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation (+ Sustainable Forest Management)</i>
GIZ	: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit	RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
GRK	: Gas Rumah Kaca	RPK	: Rencana Pemantauan Kinerja
HHBK	: Hasil Hutan Bukan Kayu	RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
HLKL	: Hutan Lindung Kelian Lestari	RTGL	: Rencana Tata Guna Lahan
HLSL	: Hutan Lindung Sungai Lesan	SDGs	: Sustainable Development Goals
HSBC	: The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	SRAK	: Strategi dan Rencana Aksi Konservasi
IDM	: Indeks Desa Membangun	TNBK	: Taman Nasional Betung Kerihun
IP	: <i>Implementation Plan</i>	TNDS	: Taman Nasional Danau Sentarum
KAP	: Kantor Akuntansi Publik	USAID	: <i>United States Agency for International Development</i>
KBAK	: Kawasan Bentang Alam Karst		
KEE	: Kawasan Ekonomi Essensial		
Kehati	: Yayasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Indonesia		
Kepmen	: Keputusan Menteri		

## DAFTAR SINGKATAN MITRA

ASRI	: Yayasan Alam Sehat Lestari	LPHD M. Kapuas	: LPHD Mentari Kapuas
BIKAL	: BIKAL	LPHD N. Semangut	: LPHD Nanga Semangut
Fahutan IPB	: Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor	LPHD Sembuan	: LPHD Sembuan
FAHUTAN UNMUL	: FAHUTAN UNMUL-WLILH	Menapak	: Perkumpulan Menapak Indonesia
FOKKAB	: Forum Orangutan Kalimantan Barat	MJ II	: Makmur Jaya II
Forlika	: Forlika	P. Empangau	: Pokmaswas Danau Lindung Empangau
Gapoktanhut LGS	: Gapoktanhut Lestari Gunung Selatan	P. Timbatu	: Parangat Timbatu
INDECON	: INDECON	PLAB	: Perkumpulan Lintas Alam Borneo
INTAN	: Institut Riset Teknologi dan Pengembangan Hasil Hutan	PERISAI	: Perkumpulan PERISAI
JALA	: Konsorsium JALA dan Perkumpulan Desa Lestari	PGI	: Perkumpulan Gajah Indonesia dan PLH Kaltara
KANOPI	: Konsorsium KANOPI-Lamin Segawi	Pokja Pesisir	: Pokja Pesisir Balikpapan
KELAPEH	: Kelompok Lingkungan Alam Melapeh (KELAPEH)	PRCF	: Yayasan PRCF Indonesia
Kerima' Puri	: Perkumpulan Kerima' Puri	SIPAT	: Serakop Iban Perbatasan
KKI WARSI	: KKI WARSI-LP3M	Swandiri	: Konsorsium Swandiri Institute, Kanopi, dan Lanting Borneo
KOMPAKH	: Komunitas Pariwisata Kapuas Hulu	Wehea	: Perkumpulan Wehea
KONPHALINDO	: Konsorsium KONPHALINDO-DIAL	Petkuq	: Petkuq
KSK UGM	: Kelompok Studi Karst Universitas Gajah Mada	Yasiwa	: Konsorsium YASIWA-Yayasan ULIN
LEKMALAMIN	: Lembaga Kesejahteraan Masyarakat Labuan Cermin	YK RASI	: Yayasan Konservasi RASI
LPHD Bahenap	: LPHD Bahenap	YML	: Yayasan Mangrove Lestari Delta Mahakam
LPHD Batoq Ayao	: LPHD Batoq Ayao	YPB	: Yayasan Penyu Berau
LPHD Kensuray	: LPHD Kensuray	YRJAN	: Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara
LPHD Lutan	: LPHD Lutan - Tanaa Bo Hayaq		



Pembuatan video promosi wisata Kampung Linggang Melapeh, Kutai Barat, Kaltim.





Pemandangan Matahari terbenam di Danau Sentarum, Kapuas Hulu, Kalbar

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Program

Tropical Forest Conservation Act Kalimantan (TFCA Kalimantan) adalah program kerjasama pengalihan uutang yang ke-2 (TFCA-2) antara Pemerintah Amerika Serikat (US Government-USG) dan Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia-GoI), dengan The Nature Conservancy (TNC) dan World Wildlife Fund for Nature (WWF) sebagai *swap partner*<sup>1</sup>. Kesepakatan TFCA Kalimantan ditandatangani pada 29 September 2011 melalui 3 perjanjian: (1) Perjanjian Pengalihan Utang antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat; (2) Perjanjian Biaya Pengalihan Utang antara Pemerintah Amerika, TNC, dan WWF Indonesia; dan (3) Perjanjian Konservasi Hutan antara Pemerintah Indonesia, TNC, dan WWF Indonesia. Pada tanggal 3 Februari 2012, para pihak sepakat menunjuk Yayasan KEHATI sebagai administrator program. Pelaksana program TFCA Kalimantan adalah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), Perguruan Tinggi di Indonesia, serta konsultan yang memenuhi syarat dan disetujui oleh dewan pengawas

Tujuan program TFCA Kalimantan:

1. Melindungi keanekaragaman hayati hutan yang memiliki nilai penting, spesies dan ekosistem yang langka dan terancam punah, jasa ekosistem daerah aliran sungai, konektivitas antar zona ekologi hutan, dan koridor hutan yang memiliki manfaat terhadap keanekaragaman hayati dan perubahan iklim, pada tingkatan global, nasional, dan lokal;
2. Meningkatkan mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan melalui pengelolaan sumberdaya alam secara lestari dan pemanfaatan lahan masyarakat yang berorientasi emisi rendah, dengan tetap memperhatikan kaidah perlindungan hutan;
3. Melaksanakan berbagai kegiatan untuk menurunkan emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan guna mencapai pengurangan emisi yang cukup berarti disetiap kabupaten target dengan tetap mendukung pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati; dan
4. Memberikan dukungan pada pertukaran ide dan berbagi pengalaman terkait pelaksanaan konservasi hutan dan program REDD+ di Indonesia serta menginformasikan perkembangan konservasi nasional dan kerangka kerja REDD+.

Program TFCA Kalimantan mendukung 2 program yang sedang berjalan yaitu Program Karbon Hutan Berau (PKHB) dan inisiatif *Heart of Borneo* (HoB), dengan lokasi sasaran program dilaksanakan di 4 kabupaten sasaran yaitu: Berau, Kapuas Hulu, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu. Untuk mendukung tujuan TFCA Kalimantan kegiatan juga dilakukan diluar kabupaten sasaran sebagai program *Investasi Strategis* (IS). Hingga 2021, lokasi kabupaten IS meliputi seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat, Lamandau di Kalteng, Kutai Kartanegara dan Kutai Timur di Kaltim, Kota Balikpapan, Malinau, Nunukan, dan Kota Tarakan.

---

<sup>1</sup> Pada tahun 2020, TNC (The Nature Conservancy) di Indonesia mengumumkan perubahan nama entitas nasional menjadi YKAN (Yayasan Konservasi Alam Nusantara). Dalam konteks *governance* dan pelaporan TFCA Kalimantan, nama TNC (*The Nature Conservancy*) digunakan sebagaimana nama yang tercantum dalam dokumen legal perjanjian kerjasama.

## **1.1. Struktur Laporan**

Laporan ini berisi pelaksanaan program TFCA Kalimantan periode Januari-Desember 2021. Informasi utama yang disampaikan meliputi: pengelolaan program (*governance*); administrasi hibah; pemantauan dan evaluasi; perkembangan dan capaian program; dinamika, tantangan, dan strategi intervensi; serta rencana kerja 2022.



## **II. PENGELOLAAN PROGRAM (*GOVERNANCE*)**

### **2.1. Perencanaan dan Pelaporan**

Perencanaan kerja administrator di 2021 dilakukan dalam rapat evaluasi akhir tahun yang diselenggarakan di Bogor pada 21-23 Desember 2020. Agenda kerja terjadwal yang terlaksana pada 2021 meliputi:

- a. *Governance* yang mencakup perencanaan dan pelaporan reguler; koordinasi dan konsultasi internal dengan Dewan Pengawas/Tim Teknis dan eksternal dengan berbagai pemangku kepentingan di pusat dan kabupaten sasaran termasuk dengan Bupati Berau; peningkatan kapasitas untuk staf administrator dan fasilitator kabupaten; komunikasi dan publikasi dengan penerbitan buletin 2021 dan dukungan acara Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN); *professional service* untuk mendukung Kajian Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) P3E Regional Kalimantan, kajian penurunan emisi GRK oleh mitra TFCA Kalimantan mendukung PKHB, dukungan lanjutan inisiatif Geopark di Kalimantan Timur, pengadaan audit hibah skala kecil; finalisasi laporan evaluator eksternal; kontrak *Technical Assistant Provider* (TAP) Berau dan pembukaan kantor Fasilitator Kapuas Hulu.
- b. Administrasi hibah dilakukan melalui dukungan dan pendampingan terhadap 39 mitra yang terdiri dari mitra siklus 4 dan siklus 5, serta mitra siklus 2 dan 3 yang dalam proses penutupan hibah.
- c. Pemantauan dan Evaluasi selain dilakukan melalui review laporan dan diskusi reguler dengan mitra juga dilakukan melalui kunjungan lapang yang dilaksanakan administrator, fasilitator lapang, dan Pokja PKHB. Pada tahun 2021, kunjungan lapang sudah dilakukan kepada 90% mitra, khususnya dilakukan untuk persiapan penutupan hibah.

Penyusunan laporan reguler administrator 2021 meliputi: 12 laporan dua mingguan dengan 5 laporan disusun secara bulanan, 2 laporan triwulan, laporan tengah tahun 2021, laporan tahun 2020, dan *congressional report* 2020 beserta *score card*. Laporan tahun 2021 ini akan melengkapi laporan regular yang akan difinalkan pada triwulan I 2022. Laporan dua mingguan, bulanan dan *congressional report* tidak dipublikasikan secara luas. Sementara laporan tahunan dan triwulan dapat diakses di website TFCA Kalimantan (<https://www.tfcakalimantan.org/kanal/annual-report>).

### **2.2. Koordinasi dan Konsultasi**

Di 2021, koordinasi dan konsultasi internal bersama dewan pengawas dan Tim Teknis dilaksanakan secara intensif utamanya untuk membahas *governance* TFCA Kalimantan: kepemimpinan dewan pengawas (*OC Chairmanship*), mekanisme pengambilan keputusan siklus 5 tanpa persetujuan formal WWF, persetujuan untuk memulai proses siklus 6 dan penundaannya, penerusan keanggotaan Nata Samastha sebagai dewan pengawas, pengunduran WWF dalam keanggotaan dewan pengawas, selesainya masa keanggotaan dewan pengawas Gol dan pembicaraan penerusan keanggotaan, pembicaraan USAID – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) – Kementerian Keuangan terkait mekanisme kelanjutan TFCA Kalimantan dan penggunaan dana hibah di HSBC Singapura. Pembahasan lainnya terkait

persetujuan *Management Expense* (ME) 2021 dan perkembangan mitra berjalan. Di luar koordinasi formal, administrator juga menginisiasi pertemuan informal dengan perwakilan KLHK untuk membahas mekanisme TFCA kedepan. Sebanyak 8 kali pertemuan dewan pengawas dilakukan dengan keputusan/kesimpulan diantaranya:

- Selama kurun waktu 1 tahun (2021-2022), OC *Chairmanship* akan tetap pada Ibu Herlina (TNC) dan pembahasan kelanjutanya akan dilakukan kembali setelah periode satu tahun selesai;
- Dewan pengawas sepakat melanjutkan persetujuan hibah siklus 5 tanpa suara dari perwakilan WWF, sehingga sesuai dengan FCA nilai kontrak hibah masing-masing mitra tidak lebih dari 7 Miliar;
- Untuk memanfaatkan sisa hibah yang masih ada dan agar tidak perlu melakukan perubahan terhadap FCA, dewan pengawas setuju untuk melanjutkan TFCA Kalimantan dengan melakukan proses siklus 6 yang diawali dengan identifikasi mitra yang berkinerja baik untuk ditawarkan mengajukan proposal. Dalam perkembangan terakhir proses siklus 6 tidak dilanjutkan dengan adanya surat KLHK 5 Agustus 2021 bahwa TFCA Kalimantan telah berakhir pada 28 September 2021;
- Dewan pengawas sepakat meneruskan keanggotaan Dr. Tonny R. Soehartono dari Nata Samastha selama tiga tahun ke depan sampai 2024 sebagai OC *designated member*,
- WWF menyampaikan untuk menarik diri dari TFCA Kalimantan dan akan melakukan pembahasan dengan USAID, dan dewan pengawas setuju WWF melakukan identifikasi pengganti dewan pengawas WWF di TFCA Kalimantan;
- Pembicaraan antara USAID – KLHK – Kementerian Keuangan terkait mekanisme kelanjutan TFCA Kalimantan dan opsi penggunaan sisa hibah TFCA Kalimantan masih akan dilanjutkan di 2022;
- Melalui surat KLHK di November 2021, Sekjen KLHK menyampaikan kepada USG agar program TFCA Kalimantan selanjutnya dapat mendukung target *Net Sink FOLU* 2030 Pemerintah Indonesia;
- Dewan pengawas memberikan persetujuan ME 2021 sebesar Rp7.492.456.505,- dan penarikan dana hibah siklus 5 sebesar Rp72.681.883.057,-;
- Terkait dengan perkembangan mitra, beberapa kali pertemuan dewan pengawas membahas permasalahan proyek Konsorsium Konphalindo-DIAL yang mengalami masalah internal konsorsium dan *fraud* oleh salah satu staf konsorsium. Dewan pengawas menyetujui penghentian kerjasama dengan Konphalindo-DIAL dan tidak melanjutkan pembahasan proposal modifikasi yang diajukan oleh Konphalindo.

Koordinasi dan konsultasi eksternal dilaksanakan dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyampaian informasi mitra berjalan dan dimulainya mitra siklus 5, penyelarasan proyek mitra, dan rencana inisiasi platform kerjasama program.

Sebagai langkah awal dimulainya program siklus 5, administrator mengirimkan surat ke bupati di kabupaten sasaran, dengan tembusan kepada OPD menginformasikan lembaga pelaksana siklus 5 dan isu proyek yang dikerjakan. Selanjutnya fasilitator Kabupaten Kapuas Hulu

memfasilitasi pertemuan mitra siklus 5 dengan Bappeda Kapuas Hulu dan OPD. Pertemuan juga melibatkan BPSKL Wilayah Kalimantan dan mitra pembangunan lain seperti GIZ. Dalam pertemuan, mitra memaparkan rencana proyek mereka di Kapuas Hulu dan mendapatkan tanggapan dari Bappeda, OPD dan BPSKL. Dari hasil pertemuan direncanakan akan dilakukan koordinasi lanjutan dengan Bupati Kapuas Hulu dan OPD yang akan dilaksanakan di 2022.

Di Berau, koordinasi dengan Bupati, OPD, dan KPH terkait siklus 5 dilaksanakan pada 7 Juli 2021. Dalam pertemuan administrator memaparkan capaian dan rencana kerja mitra siklus 5. Beberapa arahan yang disampaikan oleh Bupati diantaranya:

- Agar kegiatan TFCA bisa menyasar kampung-kampung yang masih memiliki IDM rendah dengan menghidupkan potensi ekonomi dan SDA setempat bekerjasama secara praktis dengan pejuang Sigap di lapangan, serta diperlukan dukungan pemberdayaan UMKM berupa peningkatan teknologi produksi, legalitas produk sampai pemasaran yang berkelanjutan.
- TFCA membantu merancang kegiatan ekowisata di kampung-kampung dan menguatkan lembaga pengelola lokal hingga mandiri dan berkelanjutan.

Di Kutai Barat dan Mahakam Ulu fasilitator bertemu dengan KPH dan Asekda I Kabupaten Mahakam Ulu menyampaikan kelanjutan dukungan TFCA Kalimantan pada 4 LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa) di dua kabupaten tersebut.

Untuk melakukan penyesuaian proyek mitra dengan OPD dan UPT KLHK, koordinasi dan konsultasi dilakukan dengan instansi pemerintah dan mitra pembangunan lain. Terkait dengan inisiatif Mangrove di Berau, administrator dan Pokja PKHB (TAP Berau) berkoordinasi dengan BRGM dan Dinas Perikanan Kabupaten untuk menyesuaikan agenda restorasi mangrove BRGM dengan kegiatan dan organisasi masyarakat binaan mitra di tingkat tapak. Koordinasi dengan Project USAID Segar dan GIZ dilakukan untuk mencari peluang sinergi aktifitas dan/atau pendanaan yang dijalankan oleh USAID Segar dan GIZ dengan mitra-mitra TFCA Kalimantan.

Lebih lanjut fasilitator kabupaten menjalankan koordinasi dengan beberapa instansi diantaranya: KPH dan Bappeda di masing-masing kabupaten sasaran, BKSDA Kalbar, Dinas LHK Kalbar, Dinas Pariwisata (Kutai Barat dan Kapuas Hulu), Dinas Perindustrian Kapuas Hulu, dan BBTNBKDS. Beberapa isu yang didiskusikan diantaranya mekanisme perubahan batas luasan HD Bahenap sebagai konsekuensi dari perubahan batas administratif desa, kemungkinan inisiatif dukungan Dinas Pariwisata di Kutai Barat dan Kapuas Hulu untuk mendukung/melanjutkan inisiatif mitra Kelapeh dan Kompahk, serta teknis pelaksanaan survei antara Fahutan IPB dengan petugas BBTNBKDS.

Di triwulan akhir 2021, administrator berkoordinasi dengan Dirjen PSKL dan memfasilitasi koordinasi antara mitra yang bekerja di isu Perhutanan Sosial dengan Kepala Balai PSKL Wilayah Kalimantan. Dalam diskusi baik dengan Dirjen PSKL maupun Kepala Balai PSKL disampaikan dukungan TFCA Kalimantan pada HA Pikul dimana salah satu penggeraknya mendapatkan penghargaan Kalpataru dari Menteri LHK. Beberapa isu lain yang didiskusikan dengan Kepala Balai PSKL bersama mitra diantaranya esensi perubahan Permen LHK no 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial ke Permen LHK no 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial,

strategi pelaksanaan atas perubahan luasan ijin HD sebagai konsekuensi dari perubahan deliniasi administratif desa, dan peranan KPH dalam pendukung penerima ijin.

Bersamaan dengan pemantauan daring kegiatan mitra dan kunjungan lapang, administrator berkoordinasi dengan Kepala Balai TNKM dan KKI WARSI, serta Kepala Balai TNBBR dan ASRI. Koordinasi dilakukan untuk mengecek keselarasan agenda mitra dengan agenda balai, dan melihat kesenjangan informasi atau ekspektasi. Dari hasil diskusi, informasi proyek ASRI ke balai tidak berjalan dengan baik sehingga informasi perkembangan proyek perlu disampaikan ke Balai TNBBR. Indikasi demikian tidak terjadi di proyek KKI Warsi dan TNKM dimana kepala balai dan KKI Warsi cukup intensif komunikasi dan terbuka dalam perencanaan kegiatan.

Penyelarasan kegiatan mitra dengan tujuan pembangunan SDGs dilakukan melalui mekanisme pelaporan SDGs baik di tingkat pusat maupun tingkat provinsi. Di tingkat pusat, bersama dengan Yayasan KEHATI, hasil dari proyek TFCA Kalimantan dianalisis keselarasannya dengan indikator SDGs kemudian dilaporkan ke Bappenas. Sementara di tingkat provinsi melalui Bappeda Kalbar dan Kaltim, capaian mitra TFCA Kalimantan yang dihimpun dalam matrik SDGs provinsi telah dilaporkan.

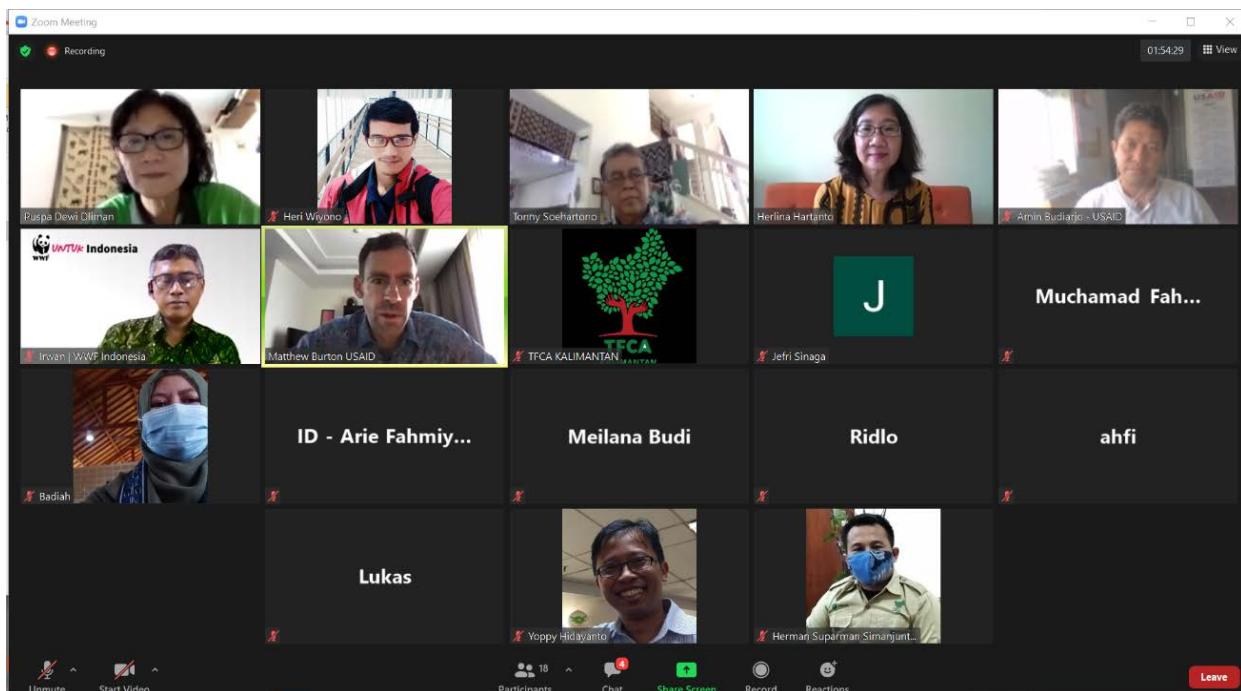
Koordinasi untuk inisiasi platform kerjasama program diawali dengan diskusi dengan PT. Citra Capital Lestari (Lestari Capital) dan PT. Dharma Satya Nusantara di awal tahun. Secara khusus, Lestari Capital yang bekerjasama dengan PRCF Indonesia (mitra siklus 5) mengembangkan skema insentif karbon SCCM (*Sustainable Commodities Conservation Mechanism*) menawarkan peluang kerjasama untuk saling menghubungkan antar mitra Lestari Capital dan TFCA Kalimantan untuk saling melengkapi model pendanaan, hibah dan PES. PT. Dharma Satya Nusantara sebuah perusahaan perkebunan yang menerapkan prinsip Sustainable Palm Oil dan kebijakan NDPE (*No Deforestation, No Peatland Development, No Exploitation*) membuka peluang kerjama dengan mitra TFCA Kalimantan di area sekitar lokasi konsesi dengan mendukung perusahaan dalam menerapkan praktik-praktik pengelolaan hutan lestari. Peluang kerjasama yang mungkin dapat dilaksanakan adalah dengan mitra TFCA Kalimantan LPHD Batoq Kelo di Mahakam Ulu dan Wehea Petkuq di Muara Wahau.

Bersama dengan program lain di KEHATI, administrator terlibat dalam inisiasi platform kerjasama antara Yayasan KEHATI dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. TFCA Kalimantan menjadi bagian dari tim penyusun naskah kerjasama yang ditandatangani di bulan April 2021. Menindaklanjuti penandatanganan tersebut, rapat teknis untuk implementasi kerjasama dilaksanakan secara berseri sepanjang semester II dengan kesepakatan teknis implementasi kerjasama berupa penyusunan kebijakan hulu hilir termasuk *traceability* terkait desa melalui pembelajaran pengembangan 3 produk ekonomi yang difasilitasi KEHATI yaitu sawit, sorgum, dan kopi. Kajian studi kebijakan termasuk kunjungan sampel studi dilakukan hingga akhir 2021 dan akan dilanjutkan di 2022.

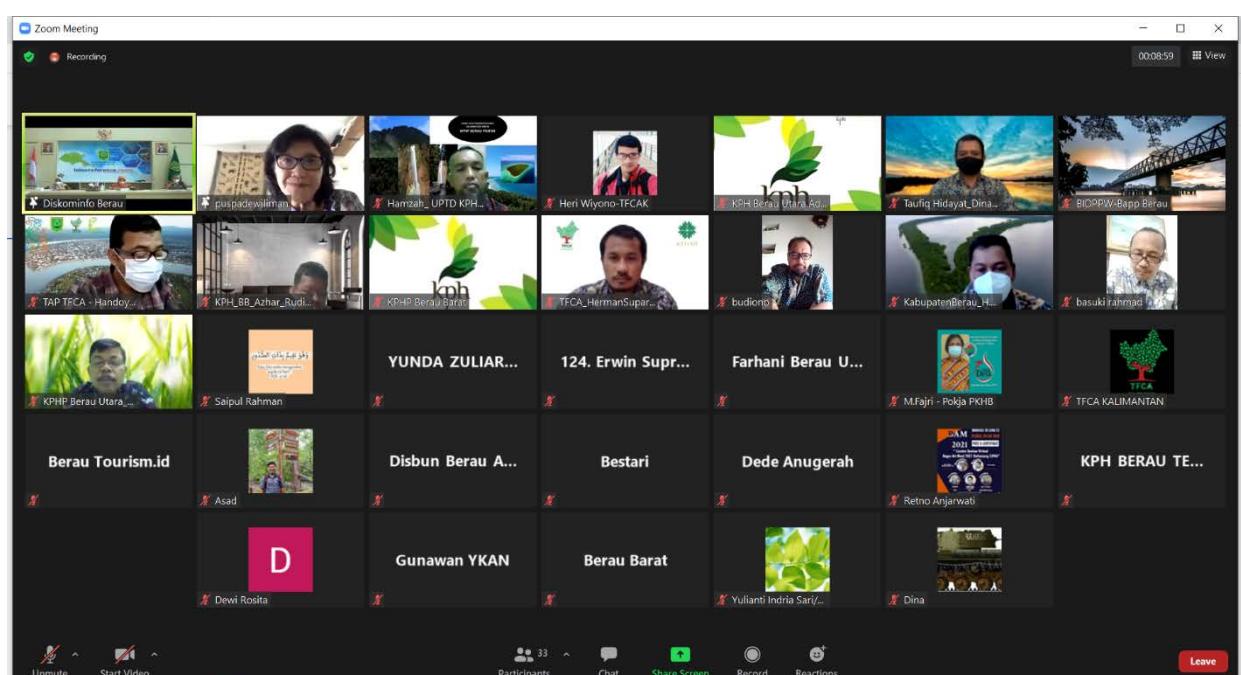
Koordinasi awal dengan Subdit REDD+ Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran umum terkait kebijakan *Net Sink FOLU* 2030 dan bagaimana keselarasnanya dengan proyek mitra siklus 5. Koordinasi lanjutan dengan Biro KLN dilakukan dalam rangka menggali ide mekanisme lanjutan TFCA Kalimantan dan kemungkinan dana hibah TFCA Kalimantan digunakan untuk mendukung kebijakan *Net Sink FOLU* 2030. Rencana

koordinasi dengan Balai PPI Wilayah Kalimantan hingga akhir tahun belum terlaksana karena jadwal yang belum memungkinkan dan akan dibicarakan kembali di 2022.

Dalam rangka mengawal revisi UU Konservasi SDAH&E No. 5 tahun 1990, administrator terlibat dalam rapat dengar pendapat komisi IV DPR dengan Kementerian LHK, KKP dan Pertanian di awal tahun 2021. Dari hasil konsultasi tersebut, DPR akan menyelesaikan naskah akademik dan Kementerian akan melakukan evaluasi pelaksanaan UU tersebut. Hingga akhir 2021 pembahasan dan revisi tersebut masih belum selesai.



Pertemuan reguler admin dengan *Oversight committee* (OC) TFCA Kalimantan



Pertemuan koordinasi pelaksanaan program TFCA kalimantan dengan pemkab Berau.

### **2.3. Peningkatan Kapasitas**

Kegiatan peningkatan kapasitas staf administrator dilaksanaan melalui berbagai *share learning* yang diselenggarakan oleh Yayasan KEHATI dan administrator maupun partisipasi pelatihan baik *inhouse* maupun oleh pihak luar. Beberapa tema *share learning* yang diikuti diantaranya: pengalaman pelaksanaan kegiatan oleh mitra KEHATI dalam perencanaan ruang hijau dan *bioprospecting*, *blue carbon* dan energi terbarukan, penyajian data dengan software tableau, rehabilitasi mangrove dan taman Kehati, konservasi mangrove dan budidaya rajungan di kawasan penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK), serta Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia Rekomendasi Perbaikan UU Konservasi. Di bulan Februari, administrator menyelenggarakan *share learning* terkait Peranti (Perangkat Mandiri Penilaian Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Nirlaba Indonesia) untuk menyiapkan fasilitator dalam penilaian kapasitas kelembagaan mitra.

Bekerjasama dengan Tempo Institute, administrator menyelenggarakan pelatihan “Creative, Innovative, Motivation and Inspiration”, dengan peserta pelatihan staf administrator, fasilitator kabupaten, dan staf KEHATI. Pemateri memberikan *inductional personality* kepada peserta untuk bekerja lebih kreatif, dan memiliki visi personal yang sesuai dengan visi organisasi. Materi lain yang disampaikan terkait tools untuk berfikir kreatif seperti: brainstorming, mindmap, dan fishbone.

Pelatihan lain yang diikuti oleh staf administrator yaitu: pelatihan bahasa Inggris online general dan academic writing; pelaporan keuangan dan perpajakan ISAK 35 berbasis otomatisasi excel; *Fraud Procurement*, analisa laporan keuangan mendasarkan pada standar IAI, penulisan artikel populer, pembuatan profil tanah, dan penyusunan KLHS.

### **2.4. Komunikasi dan Publikasi**

Aktifitas komunikasi di 2021 meliputi: penyelenggaraan/partisipasi webinar, dukungan kegiatan HKAN 2021, partisipasi pameran COP 26 KLHK, dukungan penelitian Biodiversity Warrior, dan pencetakan material komunikasi TFCA Kalimantan dan mitra.

Pelaksanaan kegiatan webinar diselenggarakan oleh administrator; bersama program lain di KEHATI; atau bersama LSM lain, instansi pemerintah, dan mitra penerima hibah seperti: Indonesia Water Institute, Balai Besar TNBKDS, ECOTON Foundation, Indecon, dan PRCF. Dalam rangka peringatan hari air dan hari bumi, direktur program TFCA Kalimantan sebagai salah satu pembicara dan mempresentasikan topik “Lahan basah sebagai ekosistem yang penting dalam tata air dengan contoh Taman Nasional Danau Sentarum” dan “Upaya perlindungan keanekaragaman hayati Sungai Mahakam dengan informasi upaya konservasi pesut yg dilaksanakan oleh mitra TFCA Kalimantan, Yayasan Konservasi RASI di Sungai Mahakam”. Dalam rangka peringatan hari hutan se-dunia, mitra TFCA Kalimantan PRCF sebagai narasumber webinar mempresentasikan inisiatif konservasi hutan desa dan konservasi karbon di Hutan Desa Nanga Lauk sebagai contoh inisiatif pengelolaan hutan lestari di wilayah HoB.

Webinar “Upaya konservasi kehati di Kalimantan” diselenggarakan sebagai rangkaian dukungan terhadap HKAN 2021. Acara mengundang pembicara dari mitra TFCA Kalimantan: YRJAN,

TITIAN, dan Indecon. Mitra mempresentasikan inisiatif proyek konservasi yang pernah dilakukan dengan dukungan dari TFCA Kalimantan.

Memperingati hari mangrove internasional di bulan Juli 2021, administrator bersama Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyelenggarakan webinar bertema "Pengelolaan ekosistem mangrove" di Berau. Dalam acara tersebut dipresentasikan kebijakan daerah terkait mangrove, hasil penelitian bekantan, dan inisiatif-inisiatif terkait mangrove oleh mitra TFCA Kalimantan di Berau. Acara juga dimaksudkan sebagai pembuka rencana pembahasan peraturan bupati (Perbup) terkait mangrove di APL dan pembentukan lembaga pengelola mangrove daerah.

Dari keseluruhan penyelenggaraan webinar di 2021, lebih dari 1300 orang berpartisipasi dalam acara baik secara langsung maupun melalui kanal youtube. Segmentasi partisipan beragam baik dari instansi pemerintah pusat, daerah, kecamatan, dan desa; masyarakat sipil, serta mahasiswa.



1. Kegiatan di booth KEHATI pada pameran COP 26 yang diselenggarakan di manggala wanabakti, KLHK
2. Seremonial acara puncak Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2021 di Kupang.

Selain penyelenggaraan webinar, dukungan pada acara HKAN 2021 dilakukan melalui penyelenggaraan “Jalan santai konservasi Healing Forest di TWA Bukit Tangkiling Palangkaraya”. Kegiatan ini ditujukan untuk mempopulerkan HKAN dan mempromosikan obyek wisata TWA Bukit Tangkiling serta hasil hutannya seperti: VCO, madu, dan sirup rosella. Berbagai souvenir dicetak untuk memeriahkan acara. Kegiatan diikuti oleh 100 orang peserta dari kantor BKSDA Kalimantan Tengah, mahasiswa pencinta alam, dan perwakilan masyarakat.

Berpertisipasi untuk memeriahkan penyelenggaraan COP 26 Indonesia Climate Change Expo yang diselenggarakan oleh KLHK, TFCA Kalimantan bersama program lain di KEHATI memamerkan hasil-hasil proyek mitra termasuk produk-produknya seperti tenun iban, madu, dan pengetahuan berupa informasi proyek dalam *booth* bersama. *Booth* dikunjungi kurang lebih 300 orang pengunjung.

Di akhir tahun, administrator melakukan penjaringan proposal sponsorship penelitian untuk Biodiversity Warrior dengan basis universitas di Kalimantan sebagai opsi kegiatan “Jurnalis visit” yang tidak dapat diselenggarakan. Dari hasil seleksi dipilih 6 proposal dari 6 kelompok BW dari Universitas Tanjung Pura (Untan) dan Mulawarman (Unmul) dengan topik penelitian diantaranya: identifikasi keragaman kupu-kupu di Kampus Unmul, pendokumentasian praktik konservasi mangrove *Bruguiera hainesii* di Kubu Raya, dan kajian etnomedisin suku Dayak Tunjung di Kutai Kartanegara. Hingga akhir 2021, tidak semuanya laporan penelitian dan produk komunikasi yang direncanakan terealisasi, dan akan dilanjutkan di 2022.

Untuk menyebarluaskan hasil mitra TFCA Kalimantan dan mendukung promosi konservasi di kabupaten sasaran, administrator mempublikasikan dan/atau mencetak beberapa buku dan lembar informasi diantaranya buku rekam jejak mitra, buletin 2021, buku ekowisata Kalbar, dan kalender langur borneo/lutung sentarum. Hasil cetak produk tersebut disebarluaskan melalui pameran, *hand to hand*, dan beberapa diantaranya dapat diunduh di website TFCA Kalimantan.



Promosi dan  
publikasi TFCA  
Kalimantan: buku  
rekam jejak mitra,  
bulletin 2021,  
kalender langur  
borneo/lutung  
sentarum, brousur  
produk HHBK.

## **2.5. Jasa Profesional (*Professional Services*)**

Jasa professional untuk mendukung kinerja program dan proyek mitra di 2021 dilakukan melalui pengadaan: jasa konsultan untuk penghitungan kontribusi mitra TFCA Kalimantan pada penurunan emisi PKHB, fasilitasi Kajian Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup di kabupaten sasaran, dukungan jasa konsultan untuk fasilitasi pengusulan Geopark Sangkulirang Mangkalihat, dan pengadaan auditor untuk mitra hibah skala kecil.

Lelang jasa konsultan teknis untuk penghitungan kontribusi mitra TFCA Kalimantan pada penurunan emisi PKHB dimulai pada bulan Juni 2021 dengan penunjukan kontrak kerja dimulai pada September 2021. Di Bulan Oktober tim konsultan telah mengirimkan laporan pendahuluan dan perbaikan hasil pembahasan bersama tim teknis. Di bulan Desember disepakati perpanjangan waktu kontrak pekerjaan dari yang semula berakhir di Desember 2021 menjadi Februari 2022 dengan pertimbangan rasionalisasi waktu terkait kendala teknis perlakuan data yang memerlukan tambahan waktu pekerjaan.

Untuk mendukung perbaikan perencanaan lingkungan hidup di kabupaten sasaran termasuk perencanaan kehutanan, TFCA Kalimantan mendukung P3E Regional Kalimantan dalam memfasilitasi Kajian Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup. Melalui seri diskusi dan pertemuan dengan OPD kabupaten sasaran sepanjang 2021, diputuskan fokus dukungan fasilitasi TFCA Kalimantan akan dititikberatkan untuk Kabupaten Berau dan Kapuas Hulu, mengingat Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu mendapatkan dukungan fasilitatif dari mitra pembangunan lainnya. Hingga akhir 2021 baik tim P3E, konsultan, dan OPD dari kabupaten masih memfinalkan dokumen dan akan dilanjutkan di 2022.

Sebagai tindak lanjut proyek KSK UGM di siklus 2 dalam upaya Konservasi Karst Sangkulirang Mangkalihat, tim KSK UGM bersama TNC dan Pemprov Kaltim menginisiasi usulan Taman Bumi (Geopark) ke Kementerian ESDM. Melanjutkan dukungan tersebut, TFCA Kalimantan berkontribusi mendukung inisiatif tersebut melalui tim Prof. Eko Haryono (UGM) melakukan kerja fasilitatif untuk finalisasi dokumen usulan, pembentukan lembaga pengelola di tingkat provinsi, dan pengembangan dokumen rencana induk geopark. Di Bulan November 2021 kontrak pekerjaan telah ditandatangani untuk periode pekerjaan satu tahun hingga Oktober 2022.

Proses pengadaaan auditor untuk mitra SGF: Makmur Jaya 2, FORLIKA, Parangat Timbatu, dan Kerima' Puri dimulai pada bulan Agustus 2021 dengan proses seleksi penilaian di bulan September, dan kontrak auditor terpilih KAP S.Mannan, Ardiansyah dan Rekan U.P Yazid M. Aleq Bawahi dilakukan di bulan Oktober 2021. Proses audit dimulai di Bulan November hingga Desember 2021 pekerjaan pemeriksaan dan klarifikasi temuan masih dilakukan dan kontrak pekerjaan diperpanjang hingga Januari 2022.

## **2.6. Eksternal Evaluator**

Sepanjang semester I, administrator melakukan diskusi dengan AKATIGA untuk memfinalkan laporan Evaluasi Eksternal. Secara substansi laporan evaluasi sudah tidak ada perbaikan kecuali pada kesalahan teknis: salah ketik, input data, layout, dan ketidaksesuaian pilihan diksi terjemahan dalam laporan versi bahasa Inggris. Pada bulan Agustus, final perbaikan laporan telah dikirimkan ke administrator.

## 2.7. TAP

Kontrak tahun ke dua Pokja PKHB sebagai TAP Berau ditandatangani di bulan April 2021 bersamaan dengan kontrak mitra siklus 5. Jangka waktu pekerjaan dilakukan secara over years hingga Maret 2022. Cakupan pekerjaan meliputi: (1) Peningkatan kapasitas organisasi dan kinerja PSDABM mitra TFCA Kalimantan dengan menggunakan tools PERANTI dan Tata Kelola PSDABM; (2) Mensinergikan proyek antar mitra TFCA Kalimantan dan mengintegrasikan hasil proyek mitra dengan Program Karbon Hutan Berau, Program Pemerintah Kampung (TGLK, RPJMK), Pemerintah Daerah (RTRW, RPJMD, dan Renstra OPD teknis), dan Kebijakan Pemerintahan Pusat, serta donor lain yang bekerja di Kabupaten Berau; dan (3) Pendampingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan proyek mitra serta pelaporan proyek Pokja PKHB kepada administrator. Jumlah mitra yang didampingi meliputi 5 (lima) mitra KSM, 5 (lima) LSM, dan 9 (sembilan) KSM dampingan mitra di Berau.

Laporan tengah tahun pelaksanaan kegiatan pokja PKHB telah disampaikan kepada administrator di bulan Oktober 2021. Beberapa hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana cakupan kerja yaitu:

- Pelaksanaan peningkatan kapasitas organisasi dilaksanakan melalui pelatihan PERANTI dan PSDABM secara tatap muka, online, dan *one on one* saat kunjungan lapang oleh Pokja PKHB. Target peningkatan nilai dari baseline buruk dan sedang (<233) menjadi baik (>233) belum dapat dilaporkan mengingat penilaian akhir baru akan dilakukan di 2022. Namun demikin indikasi perubahan positif ditunjukkan dari rerata nilai pre-test dan post-test pelatihan yang meningkat dari 60,8 ke 78,8. Terkait dengan PERANTI, Pokja PKHB juga melakukan pengembangan *tools* dengan penambahan area tinjauan *leadership*. Detil pengembangan akan disampaikan dalam laporan akhir Pokja PKHB di 2022.
- Sinergitas proyek mitra (antar mitra, proyek mitra dengan kebijakan, mitra dengan donor lain) dilaksanakan melalui berbagai kegiatan diantaranya: Koordinasi dengan bupati, wakil bupati, Bappelitbang, KPH dan OPD di Berau; Koordinasi dengan TNC dan pejuang SIGAP sejahtera; Koordinasi dengan Proyek USAID Segar dan GIZ, Koordinasi dengan BRGM, serta rapat regular antar mitra TFCA Kalimantan. Beberapa hasil koordinasi diantaranya: kesepakatan pembentukan Forum Komunikasi dan Informasi LSM Berau; fasilitasi perumusan dan pelaksanaan langkah kerja penyusunan Perbup pengelolaan mangrove di wilayah APL termasuk pembahasan draft Perbup dan penyiapan kelembagaanya (KKMD); bersama GIZ melakukan proses mediasi terkait *area of interest* perkebunan sawit yang beririsan dengan RTGL kampung Long Laai, Long Ayap, Long Ayan, Gunung Sari dan Dumaring; konsultasi kegiatan mitra dan irisanya dengan RPJMKB; serta keterlibatan dalam inisiasi perkebunan berkelanjutan di Berau.
- Pendampingan dan pemantauan-evaluasi mitra dilaksanakan melalui kajian laporan mitra, *coaching* perbaikan laporan dan dokumen RKT PMP, serta kunjungan lapang berdiskusi dengan mitra, penerima manfaat, dan mengecek bukti-bukti pelaksanaan proyek dan transaksi keuangan. Dalam pelaksanaan kegiatan kecuali mitra JALA semua mitra berjalan sebagaimana rencana. Kelemahan dalam pelaporan terutama pengisian PMP diintervensi melalui *one on one coaching*. Mendasarkan pada 7 item indikatif kapasitas keuangan mitra, secara umum kapasitas mitra pada tingkat sedang hingga baik.

Terkait dengan pelaksanaan audit hibah skala kecil, Pokja PKHB membantu proses persiapan dan klarifikasi pelaksanaan audit.

Selain 3 hasil pelaksanaan kegiatan diatas, pada bulan November Pokja PKHB dan TNC memfasilitasi proses evaluasi dokumen PKHB dengan beberapa poin evaluasi diantaranya: (1) perhitungan capaian target jumlah emisi yang diturunkan belum dilakukan secara konsisten dan masih bersifat parsial; (2) sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat tercapai dengan baik dengan indikasi jumlah kampung yang memiliki status mandiri, maju dan berkembang sudah lebih dari 99%; (3) secara umum pelaksanaan strategi dan program pada PKHB dilaksanakan oleh banyak pihak sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, sehingga capaian-capaihan target juga sangat tergantung dengan sumberdaya masing-masing lembaga pelaksana, baik sumberdaya teknis, manusia dan pendanaan hingga periode waktu. Terkait dengan poin dua, sebagaimana disampaikan dalam bagian *professional service*, TFCA Kalimantan melalui konsultan sedang melakukan kajian kontribusi mitra TFCA Kalimantan pada target penurunan emisi PKHB yang akan dilaporkan kepada sekretariat PKHB untuk bahan evaluasi ke depan.

Sepanjang triwulan I dan II, fokus kerja fasilitator Kabupaten di Kapuas Hulu dan Kutai Barat-Mahakam Ulu adalah pada persiapan siklus 5 dengan penyiapan/pengecekan dokumen pendukung untuk kontrak PPH seperti rekening lembaga, final proposal, RKT, RPK/PMP, termasuk pengecekan keberadaan personil lembaga yang namanya tercantum dalam proposal. Pasca kontrak dan penyaluran hibah tahap 1, fasilitator fokus pada pendampingan utamanya pada 4 LPHD dan 1 LPHA.

Di Kutai Barat dan Mahakam Ulu pendampingan yang awalnya dilakukan oleh Konphalindo-DIAL tidak berjalan karena terdapat masalah internal konsorsium. Merespon hal tersebut tugas pendampingan kepada 3 LPHD dan 1 KSM dikembalikan ke fasilitator kabupaten. Sementara mitra diluar kabupaten sasaran yang semula akan didampingi oleh fasilitator dilakukan oleh administrator. Dalam pendampingan di Kutai Barat dan Mahakam Ulu, fasilitator melakukan kajian assessment Peranti dengan hasil 3 LPHD mendapatkan nilai merah (10-19) atau organisasi berada pada tahap awal fase penemuan gagasan dan pembentukan kelompok. Dengan demikian model pendampingan 3 LPHD perlu dilakukan secara intensif dengan model *live in*.

Pada bulan Agustus 2021 fasilitator Kutai Barat dan Mahakam Ulu mengundurkan diri dan belum terdapat pengganti hingga 2021, proses rekrutmen pengganti akan dimulai di 2022 dengan sementara pendampingan di Kutai Barat dan Mahakam Ulu dilaksanakan oleh administrator.

Di 2021 fasilitator Kabupaten Kapuas Hulu membuka kantor fasilitator di Putussibau untuk memudahkan koordinasi 3 orang faskab dan menyediakan tempat diskusi dan pendampingan kepada mitra. Keberadaan kantor ini efektif mendukung pendampingan mitra dengan indikasi rutinya kunjungan mitra ke kantor untuk berdiskusi.



Koordinasi dan konsultasi Pokja PKHB dengan Bupati Berau terkait program TFCA Kalimantan di Kantor Bupati Berau, Kaltim.



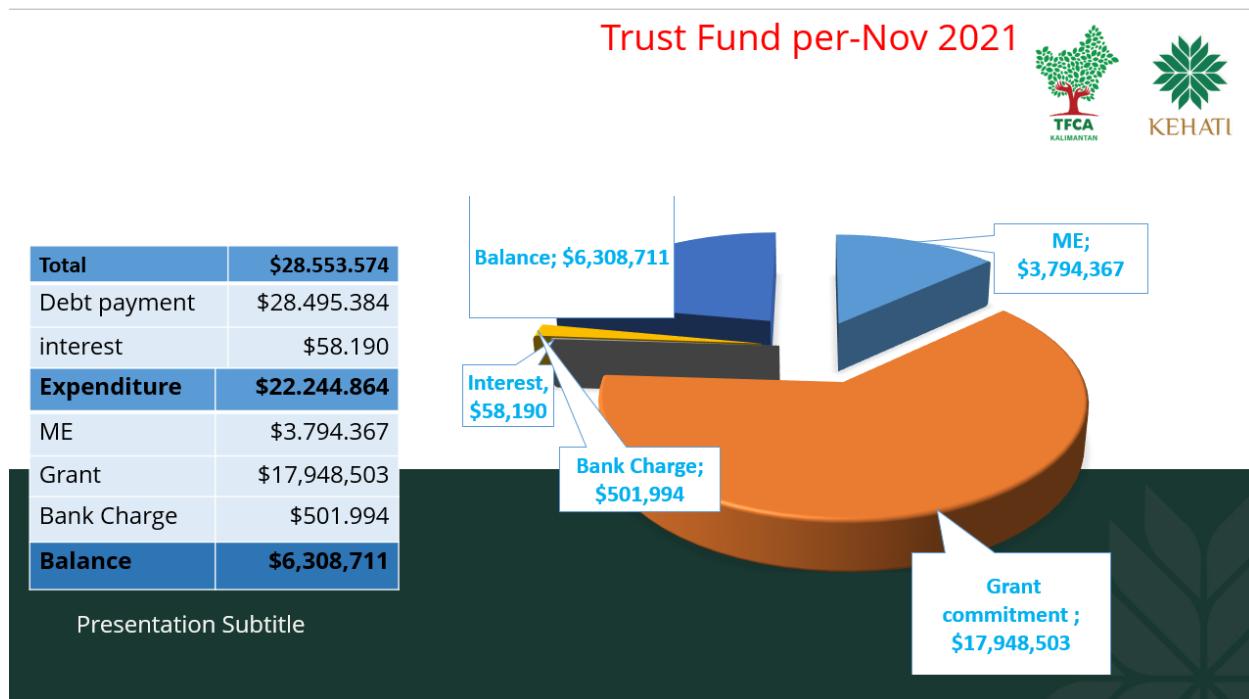
Koordinasi Pokja PKHB dengan LSM di Kabupaten Berau terkait Program TFCA di Berau, Kaltim.



Koordinasi Indecon dengan BBTNBKDS terkait kegiatan promosi wisata di Kapuas Hulu, Kalbar

## 2.8. Administrasi dan Keuangan

Pembayaran utang Pemerintah Indonesia ke rekening Trust Fund terakhir kali dilakukan pada 20 September 2019 sebesar USD157,663.83. Nilai pembayaran tersebut melengkapi total pembayaran utang sebesar USD 28,495,384 atau telah 100% dilakukan, dan dengan penambahan bunga rekening menjadi USD 28.5 juta. Dengan demikian tidak akan ada lagi pembayaran utang di tahun 2021 dan setelahnya. Status balance dana di rekening Trust Fund per November 2021 adalah USD 6,308,705 dengan komposisi alokasi sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Status rekening Trust Fund per November 2021

Pada tahun 2021, total ME yang disetujui oleh dewan pengawas sebesar Rp 7.492.456.505,-. Dengan alokasi anggaran meliputi personil, proses siklus 5, pertemuan koordinasi internal dan eksternal, pemantauan dan evaluasi (termasuk kunjungan tim teknis/dewan pengawas), komunikasi dan publikasi, pembayaran audit, TAP, administrasi umum, management fee, dan peningkatan kapasitas. Penggunaan ME hingga Desember 2021 sebesar 74% atau sebesar Rp 5.436.105.739,- untuk pengeluaran: penggajian personil, rapat internal, jasa konsultan, komunikasi dan publikasi, administrasi umum, audit tahap I 2020, evaluator eksternal AKATIGA, dan biaya untuk TAP.

Audit program TFCA Kalimantan tahun 2020 menjadi bagian dari audit Yayasan KEHATI yang dilakukan oleh auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF Accountants & business advisers). Proses audit dibagi menjadi 2 rentang waktu bulan November 2020 dan Februari 2021. Audit pada bulan November dilakukan untuk transaksi keuangan periode Januari-September 2020, sementara audit pada bulan Februari dilakukan untuk transaksi keuangan periode Oktober-Desember 2020. Sampel audit yang diajukan yaitu mitra Jala dan Kompakh, dengan pemeriksaan laporan tanpa kunjungan

lapangan dikarenakan pandemi Covid 19. Proses audit masih berjalan sampai saat ini, dengan hasil yang belum dapat dilaporan.

Pada bulan Februari 2021, mitra RASI menyelenggarakan audit dengan hasil opini "Laporan pertanggungjawaban dana disajikan secara wajar dalam semua hal material dan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia". Di Bulan November – Desember 2021, mitra Kompakh juga melaksanakan audit dengan proses yang belum selesai dan hasil audit akan disampaikan di 2022.

Proses audit mitra SGF: Makmur Jaya 2, FORLIKA, Parangat Timbatu, Kerima' Puri dimulai pada bulan November 2021 dengan auditor KAP S.Mannan, Ardiansyah dan Rekan U.P Yazid M. Aleq Bawahi. Rapat *kick off*, presentasi rencana kerja dan tata waktu, identifikasi data yang diperlukan, penyepakatan akan aktifitas audit dan proses komunikasi telah dilakukan dan disepakati. Hingga Desember 2021 pekerjaan audit pada tahap pemeriksaan dan klarifikasi temuan dengan pekerjaan akan dilanjutkan hingga Januari 2022.



Pohon Madu Hutan di Desa Data Dian, Kabupaten Malinau, Kaltara



Pelatihan penyusunan laporan kegiatan dan keuangan, LPHD Samaturu, Berau,Kaltim

### **III. ADMINISTRASI HIBAH**

#### **3.1. Siklus Hibah**

##### **3.1.1. Siklus 2-4**

Di 2021 terdapat mitra yang didampingi meliputi:

- Mitra yang masih beraktifitas dilapangan: Kompakh, Jala, Konsorsium Kanopi-Lamin Segawi, Kerima Puri, Forlika, Perangat Timbatu;
- Mitra yang melakukan perpanjangan waktu tanpa penambahan biaya yaitu: Kompakh, Konsorsium Kanopi-Lamin Segawi, Kerima Puri, dan Jala;
- Mitra yang menyelesaikan GCR: KSK UGM, Konsorsium Swandiri-Kanopi, Titian Lestari, Bikal, YK Rasi, dan Pokwasmas Danau Lindung Empangau;

Adapun capaian mitra siklus 2-4 pada tahun 2021 antara lain restorasi lahan mangrove di Tabalar Muara seluas 5 Ha dengan jumlah bibit 16.500, Integrasi rencana penyusunan tata guna lahan agroforestry dengan rencana tata guna lahan kampong di Kampung Segah. Capaian lain adalah pembangunan sarana dan prasarana pendukung ekowisata di kampong Tanjung Lokang dan Bungan Jaya berupa dermaga apung, pondok wisata, MCK serta saluran air bersih yang dimanfaatkan oleh 100 KK. Berbagai pelatihan pengembangan produk mangrove bagi kelompok masyarakat di Berau serta pengembangan budidaya kepiting di zona pemanfaatan mangrove di Tabalar Muara dan Semurut.

##### **3.1.2. Siklus 5**

Menindaklanjuti persetujuan dewan pengawas atas siklus 5, di triwulan I administrator bersama Faskab dan TAP menyiapkan kontrak calon mitra siklus 5. Komunikasi dengan 26 calon mitra dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi terkait kelembagaan seperti alamat lembaga, nomor rekening bank, dan NPWP yang akan dicantumkan dalam klausul PPH. Kontrak PPH 26 mitra dilakukan di bulan April, sementara 1 mitra, LPHD Lutan, dilakukan di bulan Juli 2021 karena keterlambatan pengurusan rekening bank dan NPWP sebagai dokumen administrasi PPH.

Pasca penandatanganan kontrak, administrator menyalurkan hibah tahap I dan melakukan penguatan kapasitas dengan penyegaran materi pengelolaan keuangan hibah, penyusunan RKT dan RPK/PMP, standar pelaporan, pemantauan-evaluasi, serta pengenalan perangkat Peranti dan PSDABM sebagai alat pengkajian kapasitas lembaga dan kinerja pengelolaan SDA. Peningkatan kapasitas dan pendampingan kepada mitra siklus 5, juga dilakukan secara intensif per mitra melalui daring baik untuk materi pengisian/penyesuaian RKT/RPK juga laporan teknis dan keuangan.

Setelah penyaluran hibah tahap I, terdapat permasalahan internal Konsorsium Konphalindo-DIAL terkait kesepakatan mekanisme kerja dan DIAL mengundurkan diri dari konsorsium, selanjutnya Konphalindo mengajukan proposal modifikasi. Untuk memulai proses pembahasan proposal modifikasi tersebut, administrator telah melakukan verifikasi keuangan dan konsorsium telah mengembalikan sisa hibah yang belum digunakan. Sehubungan dengan adanya sejumlah dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dewan pengawas meminta hal tersebut dilaporkan ke

polisi dan tidak menyetujui pembahasan proposal modifikasi sampai proses di polisi selesai. Konphalindo telah menindaklanjuti laporan ke polisi, namun terkait dengan kelanjutan kegiatan telah mengajukan somasi ke Yayasan KEHATI, dengan menyampaikan perlu adanya kompensasi kegiatan Konphalindo. Proses tersebut akan dilanjutkan pada tahun 2022.

Kecuali LPHD Lutan dan Konphalindo – DIAL, semua mitra siklus 5 melanjutkan aktifitas ditingkat tapak. Penyesuaian-penyesuaian pada tingkat aktifitas dilakukan oleh beberapa mitra tanpa mengubah *output* dan *outcome* seperti: fasilitasi pengadaan dan perbaikan sarana produksi bambu disesuaikan menjadi usaha *ecopolibag* oleh mitra PRCF; perubahan strategi kegiatan dari pelatihan pemetaan menjadi training of trainer oleh mitra Yasiwa-Ulin; dan perubahan struktur dan kontrak personil oleh KKI WARSI.

Capaian mitra siklus 5 pada tahun 2021 yang terkait dengan konservasi hutan, kehati, dan ekosistem diantaranya terlaksananya survei bioekologi lutung sentarum di TNDS; survei kehati, biofisik dan sosial di Lahan Basah Mesangat Suwi; pengusulan KKP3K di Teluk Balikapapan seluas 1.137 Ha. Capaian lainnya terkait pengembangan ekonomi masyarakat diantaranya: fasilitasi usaha bambu di desa Sriwangi, pengolahan buah mawang menjadi sirup dan selai; pembangunan rumah produksi tengkawang; pengadaan dan penanaman bibit kayu putih sebanyak 5000 bibit dan pengadaan 74 koloni madu kelulut; serta tersusunnya panduan pengelolaan daya tarik ekowisata aman covid untuk pelaku wisata. Capaian lain yang terkait aksi mitigasi dan perbaikan tata kelola SDA diantaranya patroli di hutan desa dan tersusunnya dokumen rencana kelola Hutan Adat di Menua Sungai Utik.

### **3.1.3. Siklus 6**

Pada awal Juni 2021 sesuai dengan arahan dewan pengawas untuk memulai proses siklus 6, administrator telah melakukan identifikasi mitra potensial dan selanjutnya bersama Faskab dan TAP telah dilakukan serial pertemuan dengan berbagai lembaga mendasarkan pada tema ajuan gagasan dan lokasi untuk menjaring masukan bagi program prioritas siklus 6. Mendasarkan pada penggalian ide dan gagasan tersebut, administrator selanjutnya mengirimkan surat undangan pengajuan proposal kepada 29 lembaga. Hingga Juli 2021 administrator menerima 36 proposal dan telah dilakukan penilaian awal bersama tim teknis. Dalam perkembangan selanjutnya sehubungan dengan surat Sekjen KLHK Agustus 2021, maka pada Oktober 2021 sesuai keputusan dewan pengawas, administrator telah menyampaikan keseluruh mitra tersebut bahwa proses siklus 6 tidak dapat dilanjutkan.

## **3.2. Penyaluran dan Status Mitra**

Dengan tersalurkannya hibah siklus 5, komitmen dana hibah TFCA Kalimantan pada 2021 bertambah Rp 72.681.883.057, - menjadi Rp 244.176.512.430, -. Hingga Desember 2021, total komitmen dana hibah yang telah tersalurkan adalah sebesar Rp 177.687.821.058 - dengan kinerja penyaluran di 2021 sebesar Rp 31.138.876.008,-. Informasi rinci komitmen dan penyaluran dana sebagaimana table 1.

Tabel 1. Informasi penyaluran dana hibah TFCA Kalimantan

Dukungan Program	Komitmen Hibah Siklus 1-4 (IDR)	Komitmen Hibah Siklus 5 (IDR)	Komitmen Hibah Siklus 1-5 (IDR)	Penyaluran Hibah		Total Disbursement Per Desember 2021	Sisa Dana Komitmen Hibah
				2014-2020	Januari-Desember 2021		
HoB	72.213.389.273	26.848.537.000	99.061.926.273	67.852.639.264	9.919.084.364	75.771.723.628	23.290.202.645
PKHB	77.878.692.600	20.830.670.000	98.709.362.600	59.993.707.742	10.100.609.006	70.094.316.748	28.736.353.252
Investasi Strategis	21.402.547.500	25.002.676.057	46.405.223.557	20.702.598.044	11.119.182.638	31.821.780.682	14.583.442.875
<b>Total IDR</b>	<b>171.494.629.373</b>	<b>72.681.883.057</b>	<b>244.176.512.430</b>	<b>148.548.945.050</b>	<b>31.138.876.008</b>	<b>177.687.821.058</b>	<b>66.609.998.772</b>
<b>Total USD</b>	<b>11,992,631</b>	<b>5,082,649</b>	<b>17,075,280</b>	<b>10,388,038</b>	<b>2,177,543</b>	<b>12,425,721</b>	<b>465,804</b>

Total mitra TFCA Kalimantan hingga Desember 2021 adalah 80 mitra. Pada 2021 dilakukan pendampingan kepada 39 mitra, baik yang masih beraktifitas dilapangan (33 mitra) maupun dalam proses GCR (6 mitra). Di akhir bulan Desember 2021, penandatanganan dokumen penutupan kerjasama hibah (GCR) dengan 6 mitra telah selesai, yaitu; KSK UGM (siklus 2); Yayasan Titian Lestari dan Pokwasmas Danau Lindung Empangau (siklus 3); serta Bikal, Konsorsium Swandiri dan YK RASI (siklus 4). Rincian status mitra dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Status mitra TFCA Kalimantan hingga Desember 2021

No	Jumlah dan Status Mitra	Dukungan Program			
		HoB	PKHB	HoB dan PKHB	IS
1	39 mitra yang masih aktif (33 masih beraktifitas, 6 telah GCR)	Kompakh*, LPHD Mentari Kapuas, Serakop Iban Perbatasan (Sipat), LPHD Kensuray, LPHD Bahenap, LPHD Nanga Semangut, Fahutan IPB, Yayasan Pelestari Ragamhayati dan Cipta Fondasi Indonesia (PRCF-I), LPHD Batok Kelo, Kelompok Lingkungan Alam Melapeh (KELAPEH), LPHD Sembuan, LPHD Lutan, dan Konsorsium KONPHALINDO-DIAL FOUNDATION, Konsorsium Swandiri Institute-Kanopi-Lanting Borneo**, Pokmaswas Empangau**.	Konsorsium JALA-PDL, Konsorsium KANOPI-Lamin Segawi*, Perangat Timbatu*, Makmur Jaya II*, Kerima Puri*, FORLIKA*, Perkumpulan Lintas Alam Borneo (PLAB), Perkumpulan PERISAI, Konsorsium FAHUTAN UNMUL – Wadah Layanan Informasi Lingkungan Hidup, Yayasan Penyu Berau, dan Perkumpulan MENAPAK, KSK UGM**	Yayasan Ekowisata Indonesia (INDECON)	GAPOKTANHUT Lestari Gunung Selatan, POKJA PESISIR BALIKPAPAN, Konsorsium Yayasan Konservasi Khatulistiwa Indonesia (YASWIWA) - Yayasan ULIN, KKI WARSI - LP3M, Wehea Petkuq, Institute Riset dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan (INTAN), Yayasan Alam Sehat Lestari (ASRI), dan Yayasan Mangrove Lestari Delta Mahakam, BIKAL**, Yayasan Titian Lestari**, YK RASI**.
	<b>Jumlah</b>	<b>39 mitra</b>	<b>15 mitra</b>	<b>12 mitra</b>	<b>1 mitra</b>
2	41 mitra yang telah selesai kerjasamanya.	FOKKAB, YRJAN, LPHD Bumi Lestari, CSF Unmul, AOI, FORINA, PRCF, GEMAWAN, Yayasan Dian Tama, ASPPUK, SAMPAN, Konsorsium KBCF-WARSI, Lanting Borneo, KOMPAKH, FDLL, PKK Gunung Menalig, KOMPAD, ALeRT, Pokdarwis Linggang Melapeh,	OWT, YAKOBI, PEKA, MENAPAK, FLIM, JALA, LEKMALAMIN, BP Segah, Kerima Puri, Kanopi, Konsorsium Penabulu-NTFP-LPPSLH, JKPP, Yayasan Penyu Berau, LEKMALAMIN, Perkumpulan PAYO-PAYO, KAKABE.	PENABULU dan Bioma	JARI, YAYORIN, YIARI, Konsorsium PGI-PLH,
	<b>Jumlah</b>	<b>41 mitra</b>	<b>19 mitra</b>	<b>16 mitra</b>	<b>2 mitra</b>
					<b>4 mitra</b>

\*) 6 Mitra dalam proses GCR

\*\*) 6 Mitra GCR pada 2021



Kegiatan pendampingan pengolahan ikan bandeng duri lunak pada kelompok perempuan 22  
di Desa Muara Badak Ilir, Kutai Kertanegara, Kaltim





1. Kegiatan pengolahan buah mawang oleh kelompok perempuan di Desa Sungai Utik, Kapuas Hulu, Kalbar
2. Kunjungan lapangan fasilitator Wilayah Kapuas Hulu dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan mitra di Desa Sungai Utik, Kapuas Hulu, Kalbar

## IV. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Aktifitas pemantauan dan evaluasi di 2021 meliputi: finalisasi *Standard Operational Procedure* (SOP) Pemantauan dan Evaluasi dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepada mitra. Rencana aktifitas Trip Dewan Pengawas (*OC Trip*) tidak terlaksana berkenaan dengan ketidakpastian pandemi covid 19 dan *governance* TFCA Kalimantan.

Untuk mendekatkan Panduan Pemantauan dan Evaluasi yang telah difinalkan pada tahun 2020, di awal 2021 administrator dan Faskab memfinalisasi draft SOP Pemantauan dan Evaluasi pada tingkat administrator dan mitra sebagai bagian dari persiapan siklus 5. SOP pada tingkat administrator digunakan sebagai acuan administrator, Faskab dan TAP dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Sementara SOP pada tingkat mitra digunakan sebagai acuan Faskab dan TAP membantu menyusun atau mengadopsikanya pada SOP tingkat mitra.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terkait proyek mitra dilakukan melalui kajian laporan teknis dan keuangan mitra, diskusi reguler dengan mitra dan/atau OPD, serta kunjungan lapang untuk pengecekan hasil proyek. Sementara pemantauan dan evaluasi pada tingkat programmatik dilakukan dengan menganalisa kontribusi hasil proyek mitra pada indikator output dan outcome program TFCA Kalimantan, analisa kaitanya dengan program HoB dan PKHB, analisa kaitanya dengan kontribusi program pembangunan SDGs (*Sustainable Development Goals*), serta finalisasi laporan Evaluator Eksternal.

Dalam pemantauan dan evaluasi mitra, laporan teknis dan keuangan proyek dikaji secara berkala dan dilihat kesesuaiannya dengan standar pelaporan teknis; kesesuaian dengan rencana kegiatan; serta standar pencatatan, pendokumentasi, keabsahan penggunaan anggaran, dan keseimbangan antara pengeluaran dan saldo bank. Hasil kajian digunakan sebagai dasar KAK untuk diskusi reguler dan kunjungan lapang.

Di Kapuas Hulu dan Berau diskusi reguler telah dilaksanakan dengan melibatkan OPD dan Bupati sebagaimana disampaikan dibagian koordinasi dan konsultasi. Kutai Barat dan Mahakam Ulu diskusi reguler digantikan dengan diskusi *one on one* daring per mitra oleh administrator mengingat belum terdapatnya fasilitator kabupaten pengganti.

Prioritas kunjungan lapang dilakukan dengan mempertimbangkan situasi pandemi covid dilapangan dan tingkat urgensi dari keperluan pengecekan kegiatan lapang. Beberapa mitra yang dinilai belum mendesak di kunjungi seperti KKI WARSI dan Yasiwa Ulin tidak dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan informasi untuk menilai kesesuaian perencanaan dibandingkan pelaksanaan kegiatan dan agregat aktifitas yang masih pada tahap kondisi pemungkin untuk ketercapaian output dan outcome.

Dalam hal teknis beberapa catatan umum di mitra hasil pemantauan dan evaluasi diantaranya:

- Kelemahan penyusunan laporan reguler termasuk pengisian/pembaharuan RPK/PMP;
- Kemampuan dalam mendudukan konteks aktifitas yang dikerjakan dengan sasaran output dan outcome yang disasar masih lemah, termasuk sebagai dasar penyesuaian kegiatan;

- Dokumen rencana bisnis mitra tidak didasarkan pada hasil identifikasi potensi yang detil dan baik;
- Tidak terdapat penyimpangan besar pada aktifitas yang direncanakan mitra kecuali beberapa keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian-penyesuaian untuk mencapai target/indikator pelaksanaan aktifitas;
- Integrasi atau sinergitas kegiatan mitra dengan agenda pemerintah desa/kampung atau OPD/UPT bervariasi. Beberapa mitra mampu memfasilitasi integrasi proyek dengan baik seperti Menapak, namun hal demikian tidak terjadi pada proyek Kompakh;
- Ketidakjelasan pembagian kerja antar konsorsium lembaga menjadi penyebab ketidakberlanjutan kerja konsorsium dan menghambat aktifitas di lapangan. Dua konsorsium yang mengalami permasalahan yaitu JALA – PDL dan Konphalindo – DIAL.
- Kapasitas organisasi LPHD/LPHA mendasarkan pada pengamatan fasilitator dan kajian *assessment* Peranti menunjukkan kapasitas pada tingkat dasar, dengan demikian model pendampingan perlu dilakukan secara intensif atau dengan model *live in*.

Sementara terkait administrasi keuangan hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan masih terdapat kelemahan umum dari pelaporan mitra diantaranya:

- Ketaatan terhadap prosedur keuangan masih kurang, seperti uang muka yang disalurkan oleh kasir tanpa tanda tangan dan persetujuan manajer dan direktur program, serta pembayaran perdiem yang tidak melampirkan surat tugas;
- Pemahaman dan ketelitian mitra terkait pencatatan CTH masih perlu ditingkatkan, seperti penarikan uang muka kegiatan dan tidak dicatat di CTH masih terjadi;
- Pemberkasan bukti transaksi di mitra masih lemah seperti bukti pembelian barang, KAK, dan surat konfirmasi penerimaan hibah yang luput dari pemberkasan transaksi keuangan;
- Pemahaman terkait voucher masih lemah dengan banyaknya kekeliruan dalam kelengkapan penulisan voucher seperti nomor dan otorisasi voucher;
- Ketertiban mitra dalam mencatat inventaris aset masih lemah, dengan banyaknya aset yang belum tercatat dan tertandai (tag).

Catatan hasil pemantauan dan evaluasi akan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan bagi administrator, Faskab, dan Pokja PKHB melakukan pendampingan dan peningkatan pemahaman teknis, administrasi, maupun keuangan mitra pada 2022.

Pemantauan dan evaluasi pada tingkat programmatik melalui analisa kontribusi hasil proyek mitra pada indikator output dan outcome program TFCA Kalimantan dan analisa kaitanya dengan program HoB dan PKHB disampaikan pada bagian perkembangan dan capaian program TFCA Kalimantan. Sebagai dasar analisa di 2021 administrator menyusun KAK Pemantauan dan Evaluasi besaran sebagai dasar hasil pemantauan dan evaluasi mitra. Penyusunan KAK besaran tersebut dimanfaatkan untuk melihat kontribusi capaian mitra pada program dan memudahkan agregasi pelaporan. Sebagaimana disampaikan pada bagian jasa konsultan, secara khusus terkait dengan kontribusi program TFCA Kalimantan dengan PKHB, administrator di 2021 melakukan pengadaan jasa konsultan untuk melakukan penghitungan kontribusi mitra TFCA

Kalimantan pada target penurunan emisi GRK PKHB. Laporan pendahuluan konsultan telah selesai, dengan hasil kajian yang akan dilanjutkan hingga Februari 2022.

Untuk melihat kontribusi Program TFCA Kalimantan pada SDGs, bersama Yayasan Kehati dan konsultan administrator melakukan telaah kontribusi capaian hasil mitra TFCA Kalimantan terhadap target SDGs. Telaah tersebut digunakan sebagai bagian laporan SDGs Yayasan Kehati ke Bappenas. Dari hasil telaah kontribusi capaian mitra pada SDGs menyasar pada indikator nomor 2.3.1; 8.9.1; 8.9.2; 12.8.1; 13.2.1; 14.5.1; 15.1.2; 15.2.1; 15.5.1; dan 15.7.1.

Pada tingkat provinsi administrator juga melaporkan matrik kontribusi SDGs TFCA Kalimantan kepada provinsi Kaltim dan Kalbar. Mendasarkan pada indikator SDGs untuk tingkat provinsi, kontribusi TFCA Kalimantan menyasar pada indikator nomor 2.3.1; 8.9.1; 13.2.1; 14.5.1; 15.1.2; 15.2.1; 15.7.1.



Gambar 2. Kontribusi capaian mitra TFCA Kalimantan pada SDGs



Seekor anak bekantan (*Nasalis larvatus*) sedang memakan daun lakum menjadi daya tarik wisata di hilir sungai Suwi, Muara Ancalong, Kutai Timur, Kaltim

## V. PERKEMBANGAN DAN CAPAIAN PROGRAM

Sejak 2014, melalui siklus hibah 1, 2, 3, 4, dan 5 TFCA Kalimantan telah mendanai 80 mitra untuk mendukung program HoB dan PKHB. Di 2021, 47 mitra telah menyelesaikan kerjasamanya dengan TFCA Kalimantan, 27 mitra masih menjalankan aktifitas di lapangan, dan 6 mitra dalam proses GCR. Secara keseluruhan isu proyek mitra yang dikerjakan meliputi; konservasi spesies (badak, banteng, pesut, rangkong, orangutan, gajah, dan mitigasi peredaran illegal satwa liar), pengembangan ekonomi melalui ekowisata dan wanatani (agroforestri), pengelolaan ekosistem (DAS, Danau-Rawa, Karst, dan Mangrove), serta perhutanan sosial (hutan desa, hutan adat, dan kemitraan kehutanan). Beberapa isu proyek memiliki dimensi singgungan seperti kegiatan ekowisata-konservasi arwana di Kapuas Hulu, dan ekowisata-konservasi bekantan-pengelolaan mangrove di Berau dan Delta Mahakam. Lokasi kegiatan keseluruhan mitra berada di 24 kabupaten/kota, 52 kecamatan, dan 137 desa/kampung<sup>2</sup>. Pada tahun 2021, isu proyek mitra meliputi: pengelolaan ekosistem (Danau-Rawa, Mangrove), konservasi habitat orangutan dan bekantan, perhutanan sosial (hutan desa, hutan adat, dan kemitraan kehutanan), dan pengembangan ekonomi melalui HHBK dan ekowisata. Hampir semua proyek mitra di 2021 merupakan irisan dari beberapa isu seperti konservasi habitat dan pengembangan HHBK, pengembangan HHBK dan pengelolaan hutan adat, serta pengelolaan mangrove dan ekowisata. Lokasi kegiatan mitra di 2021 berada di 11 kabupaten/kota, 27 kecamatan, dan 44 desa/kampung.

### 5.1. Capaian Indikator dan Milestone Program TFCA Kalimantan

Mendasarkan pada IP 2018-2022, informasi capaian mitra yang disampaikan mengacu pada rumusan indikator dan target milestone pertahun IP (<https://www.tfcakalimantan.org/admin/2019/08/1722/ip-tfca-kalimantan-2019.html>). Capaian program yang dilaporkan mencakup capaian pada tahun 2021, dan agregat capaian atau kumulatif dari awal program tahun 2014.

#### 5.1.1. Capaian Indikator Program

Hingga 2021 total luasan hutan dan ekosistem yang diintervensi oleh mitra adalah 819.277,74 ha, dengan luasan intervensi di tahun 2021 saja sebesar 214.484,68 ha. Dari total luas yang diintervensi, 572.062,23 ha area memiliki legalitas pengelolaan dengan 7 skema perlindungan yaitu: Kerjasama dengan Taman Nasional, Peraturan daerah (Perda) Mangrove di APL, KKP3K termasuk area pencadangan untuk KKP3K, Surat Keputusan (SK) Bupati Kawasan Lindung Daerah, Perhutanan Sosial, Kawasan Bentang Alam Karst, dan Kawasan Ekosistem Esensial. Di 2021, terdapat tambahan skema perlindungan oleh mitra yaitu: pencadangan kawasan konservasi pesisir untuk KKP3K, Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Adat, dan Kawasan Ekosistem Esensial (Tabel 3).

<sup>2</sup> Kabupaten intervensi TFCA Kalimantan meliputi 4 kabupaten sasaran dan 20 kabupaten di luar sasaran. Kabupaten sasaran meliputi: Kapuas Hulu, Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan Berau. Kabupaten di luar sasaran meliputi: Kayong Utara, Ketapang, Sintang, Melawi, Pontianak, Kubu Raya, Sambas, Singkawang, Bengkayang, Sanggau, Mempawah, Sekadau, Landak, Nunukan, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Lamandau, Kota Tarakan, Kota Balikpapan, dan Malinau

Tabel 3. Skema perlindungan hutan dan ekosistem

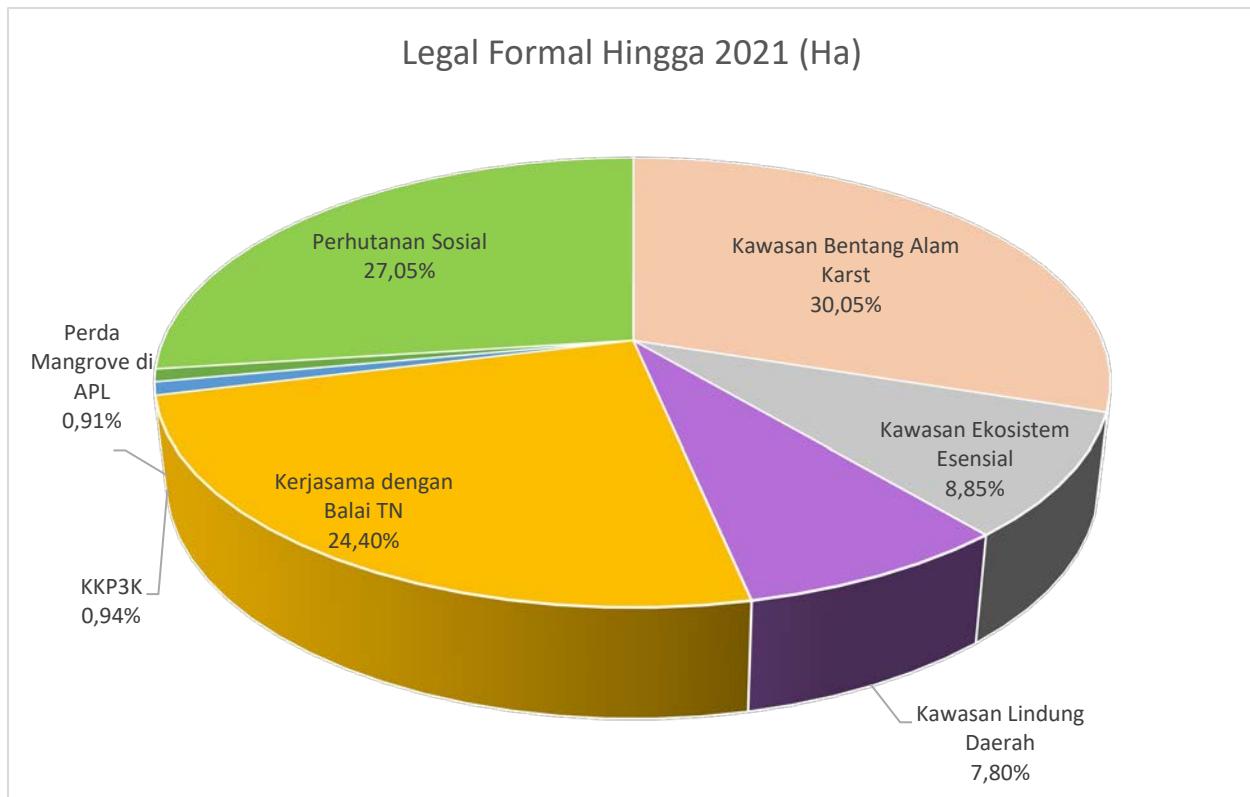
No	Skema Perlindungan <sup>3</sup>	Intervensi di 2021 (Ha)	Intervensi hingga 2021 (Ha)	Legal formal hingga 2021 (Ha)
1.	Kerjasama dg Balai Taman Nasional	54.402	148.084	139.573
<b>Keterangan:</b>				
Kerjasama Balai TNDS dengan APDS dan AOI di Zona Tradisional dan kawasan penyanga. Untuk kerjasama dengan Taman Nasional (TN) Kutai sampai proyek berakhir belum ada perjanjian kerjasama yang ditandatangani <sup>4</sup> .				
2.	Perda Mangrove di APL <sup>5</sup>	5.204,6	5.204,6	5.204,6
<b>Keterangan:</b>				
Luasan area perlindungan mangrove melalui perda yang dikelola oleh mitra hingga 2021. Melalui Pokja PKHB administrator mendukung terbitnya peraturan teknis Perbup sebagai petunjuk operasional implementasi Perda.				
3.	KKP3K	5.352,4	5.352,4	5.352,4
<b>Keterangan:</b>				
Di Berau (Semurut dan Tabalar Muara) mitra konsorsium Kanopi-Lamin Segawi mendorong kelembagaan masyarakat dalam mengelola mangrove di area KKP3K Kepulauan Derawan untuk mengisi kekosongan lembaga pengelola yang belum definitif. Implementasi pengelolaan dipayungi PKS antara kelompok masyarakat dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim.				
4.	Kawasan Lindung Daerah	1.500	44.618,7	44.618,7
<b>Keterangan:</b>				
Di Berau (Teluk Sulaiman) mitra Forlika mengusulkan sebagai pengelola Kawasan Lindung Mangrove dan Ekowisata Sigending. Di Kutai Kartanegara YK Rasi mengusulkan SK Bupati pencadangan kawasan konservasi perairan habitat pesut mahakam.				
5.	Perhutanan Sosial	97.372	162.212,47	154.734,28
<b>Keterangan:</b>				
Skema perhutanan sosial yang difasilitasi oleh mitra melalui skema hutan desa, kemitraan, dan hutan adat. Di 2021 terdapat dua Hutan Adat yang didukung di siklus 5 yaitu HA Sungai Utik dan HA Pikul.				
Sampai dengan 2021, masih terdapat 12.983,46 ha rencana kemitraan di Berau yang legalitasnya belum selesai.				
Capaian ini termasuk 13.565,58 ha pengelolaan HLSL melalui RP yang telah disahkan KPH, dengan rencana skema kerja sama pemanfaatan hutan antara KPH dan masyarakat melalui 3 skema: Kemitraan kehutanan, Kerjasama untuk mendukung ketahanan pangan, Kerjasama pemanfaatan hutan di KPH.				

<sup>3</sup> Skema perlindungan merupakan kategori dari variasi inisiatif pengelolaan SDA yang dilakukan oleh mitra. Jenis skema perlindungan mewakili pertalian antara aspek legalitas ruang – manajemen kelola – insitusi/lembaga pengelola yang diatur dalam konstruksi pengaturan dari sedikitnya Undang Undang (UU): UU Kehutanan, UU Penataan Ruang, UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU KSADAE.

<sup>4</sup> Informasi yang diterima administrator; PKS antara TN Kutai dan Bikal tidak terlaksana dikarenakan perubahan kebijakan lingkup KLHK yang mengharuskan PKS dilakukan di tingkat pusat.

<sup>5</sup> Perda perlindungan mangrove di Berau telah disahkan di DPRD Berau pada akhir 2019, namun penomoran Perda baru dilakukan di tahun 2020.

No	Skema Perlindungan <sup>3</sup>	Intervensi di 2021 (Ha)	Intervensi hingga 2021 (Ha)	Legal formal hingga 2021 (Ha)
6.	Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK)	0	403.151,89	171.925,57
<b>Keterangan:</b>				
	Mendasarkan pada Rencana Induk Pengelolaan Karst yang disusun oleh KSK UGM, Pada tahun 2019, kawasan karst di Kutai Timur sebesar 171.925,57 ha telah ditetapkan sebagai KBAK melalui Kepmen ESDM No.140K/40/MEM/2019. Sementara masih terdapat 231.226 ha area karst yang sebagian besar di Berau belum mendapatkan legalitas pengelolaan hingga 2021. Administrator di tahun 2021 – 2022 melanjutkan dukungan team KSK UGM dalam memfasilitasi usulan Taman Bumi (Geopark) Sangkulirang Mangkalihat sebagai bagian opsi pengelolaan selain KBAK.			
7.	Kawasan Ekosistem Esensial	50.653,68	50.653,68	50.653,68
<b>Keterangan:</b>				
	Di siklus 5, TFCA Kalimantan mendukung pengelolaan KEE Lahan Basah Mesangat Suwi dan KEE Wehea Kelai melalui mitra Yasiwa – Ulin dan Wehea Petkuq.			
Inisiasi pengelolaan kolaboratif KEE akan diinisiasi oleh Fahutan Unmul dengan lokasi Hutan Lindung Sungai Lesan – Hutan Lindung Gunung Menyapa, namun demikian inisiasi tersebut baru pada tahap awal yang belum jelas aspek legalitasnya.				
<b>TOTAL</b>		<b>214.484,68</b>	<b>819.277,74</b>	<b>572.062,23</b>



Gambar 3. Persentase skema perlindungan hutan dan ekosistem dengan capaian legal formal sampai dengan 2021

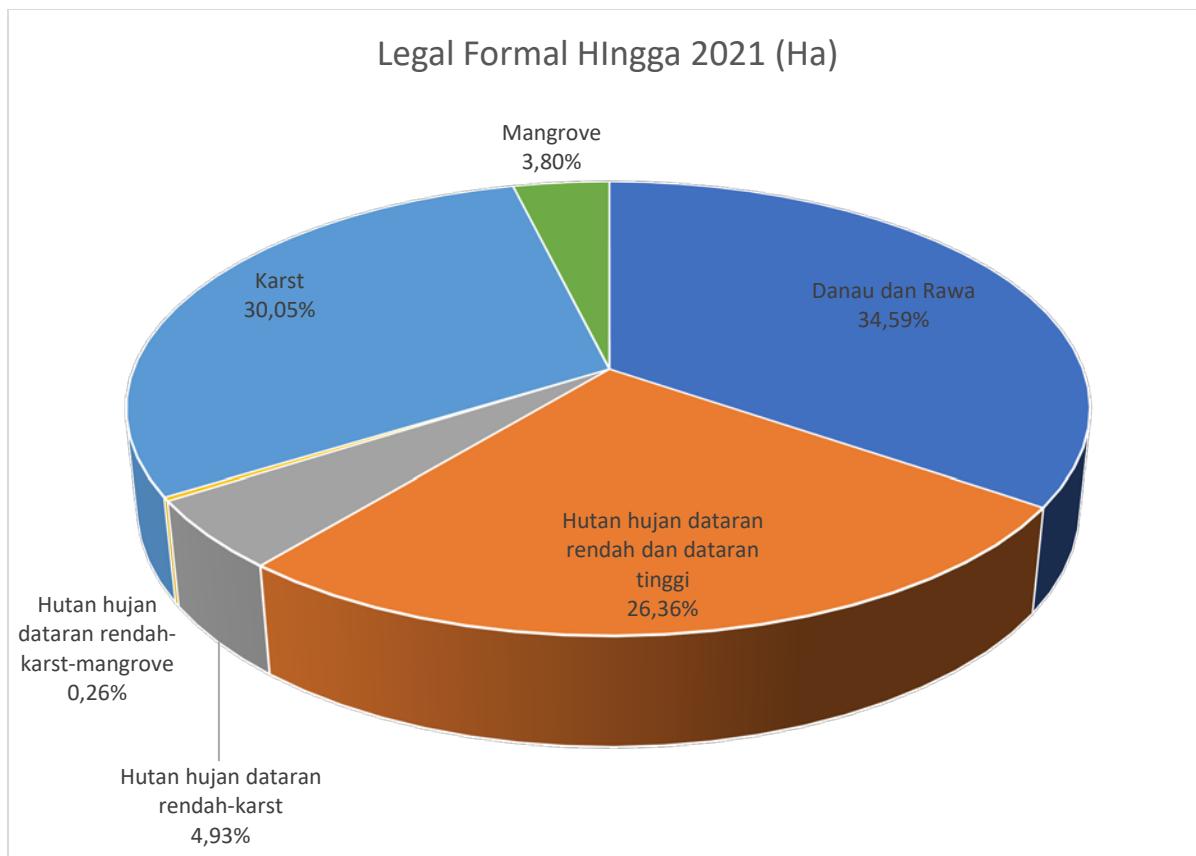
Tipe ekosistem area perlindungan terdiri 5 tipe yaitu: hutan hujan dataran rendah, hutan hujan dataran tinggi, ekosistem danau dan rawa, ekosistem karst, dan mangrove. Di antara beragam tipe ekosistem tersebut, beberapa area perlindungan yang diinisiasi oleh mitra memiliki tipe ekosistem yang campur seperti ekosistem hutan hujan dataran rendah-karst, dan hutan hujan

dataran rendah-karst-mangrove. Batasan-batasan tegas tipe ekosistem lebih sering sulit diambil karena keunikan sejarah geologi di lokasi proyek. Hingga 2021, belum ada intervensi khusus pada ekosistem hutan kerangas dan ekosistem gambut, kecuali dukungan pada penerbitan buku anggrek di cagar alam kersik luway yang merupakan hutan kerangas pernah didukung TFCA Kalimantan. Terkait dengan ekosistem gambut telah menjadi bagian dari program prioritas siklus 5, namun saat seleksi beberapa usulan proposal yang diterima karena kualitas usulan yang jauh dari harapan (Tabel 4).

Tabel 4. Tipe ekosistem dilindungi

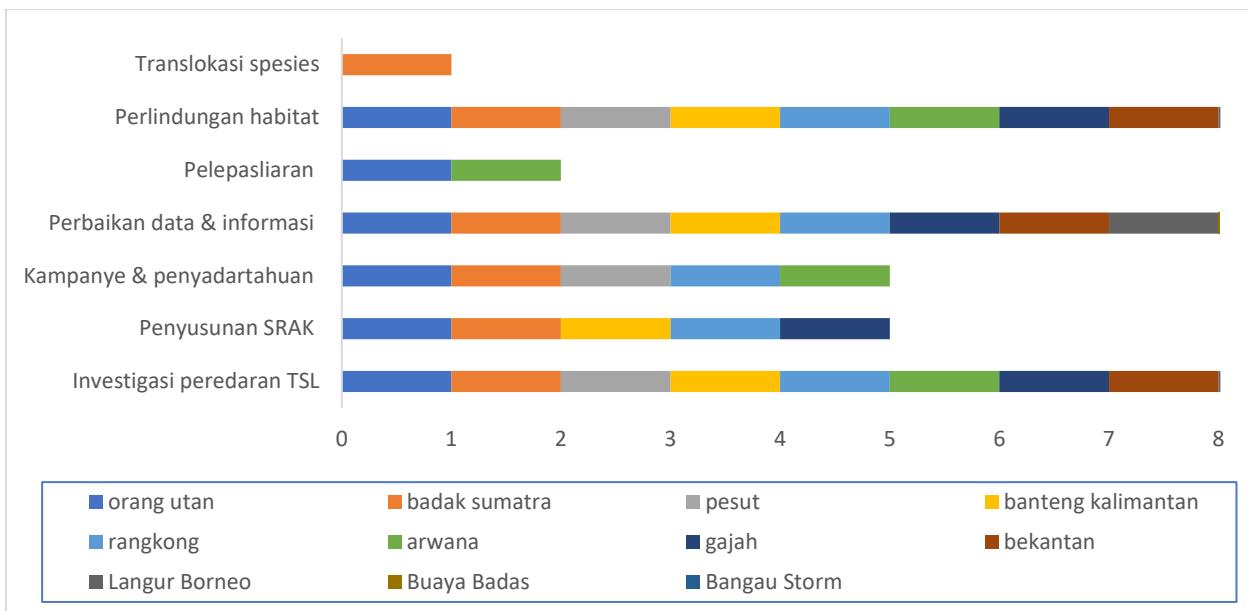
No	Tipe Ekosistem	Intervensi di 2021 (Ha)	Intervensi Hingga 2021 (Ha)	Legal formal Hingga 2021 (Ha)
1.	Hutan Hujan Dataran Rendah dan Tinggi	94.734	162.689,47	150.811,28
<b>Keterangan:</b>				
Pengelolaan hutan dataran rendah (ketinggian 0 dan 300 m dpl) dan tinggi (ketinggian 301 dan 800 dpl) dilakukan dalam area hutan desa dan hutan lindung sungai lesan <sup>6</sup> .				
2.	Hutan Hujan Dataran Rendah-Karst	28.218	28.218	28.218
<b>Keterangan:</b>				
Sebagain blok karst Tabalar-Dumaring, Biantan dan Merabu menjadi bagian dari Hutan Desa Biatan Ilir, Biatan Ulu, Dumaring, dan Merabu.				
3.	Hutan Hujan Dataran Rendah-Karst-Mangrove	1.500	1.500	1.500
<b>Keterangan:</b>				
Sebagian blok Mangkalihat menjadi bagian dari luasan Kawasan Lindung dan Ekowisata Sigending.				
4.	Mangrove	21.737	25.848	21.737
<b>Keterangan:</b>				
Perlindungan mangrove di Berau melalui Perda mangrove di APL oleh para mitra.				
5.	Karst	0	403.151,89	171.925,57
<b>Keterangan:</b>				
Enam belas blok karst di Kutai Timur ditetapkan sebagai KBAK melalui Kepmen ESDM No.140K/40/MEM/2019.				
6.	Danau dan Rawa	68.295,68	197.870,38	197.870,38
<b>Keterangan:</b>				
Area pengelolaan APDS dan LPHD Bumi Lestari di Danau Sentarum, kawasan perlindungan pesut di Kutai Kartanegara dan KEE Lahan Basah Mesangat Suwi di Kutai Timur.				
7.	Hutan Kerangas	0	0	0
<b>Keterangan:</b>				
Hingga 2021, TFCA Kalimantan belum memiliki intervensi khusus di ekosistem hutan kerangas kecuali dukungan penerbitan buku anggrek di Cagar Alam Kersik Luway.				
8.	Gambut	0	0	0
<b>Keterangan:</b>				
Program Prioritas Siklus 5, telah memasukan tema ekosistem gambut, namun belum ada usulan proposal yang diterima.				
<b>TOTAL</b>		<b>214.484,68</b>	<b>819.277,74</b>	<b>572.062,23</b>

<sup>6</sup> Definisi hutan dataran rendah dan tinggi merujuk pada The Environmental Status of the Heart of Borneo, Report HoB 2012, hal 15.



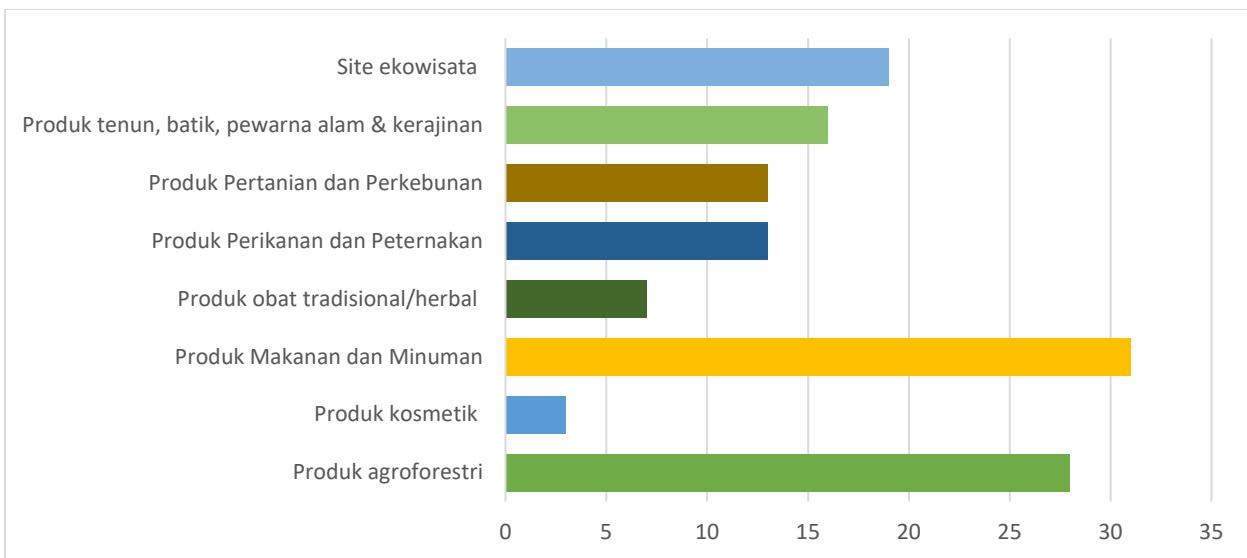
Gambar 4. Persentase tipe hutan dan ekosistem dilindungi dengan capaian legal formal perlindungan sampai dengan 2021

Sampai dengan 2021, TFCA Kalimantan telah mendukung mitra melakukan kegiatan konservasi terhadap 11 spesies *flagship*: orangutan, badak sumatra, pesut, banteng kalimantan, rangkong, arwana, gajah, bekantan, buaya badas, bangau storm, dan langur borneo. Skema konservasi spesies dilakukan dengan perlindungan habitat, pelepasliaran, perbaikan data dan informasi, kampanye dan penyadartahuan, penyusunan rencana aksi konservasi, investigasi peredaran tumbuhan dan satwa illegal, serta translokasi satwa (Gambar 5). Di 2021 kegiatan konservasi spesies *flagship* mitra terdiri dari konservasi habitat orangutan, bekantan, buaya badas, bangau storm, dan langur borneo. Melanjutkan inisiasi konservasi orangutan yang dilakukan oleh YIARI, proyek ASRI berupaya mengurangi risiko zoonosis penularan TB antara masyarakat dan orangutan, serta penyadaran masyarakat. Di Berau, Fahutan Unmul pada tahap awal inisiasi pengelolaan kolaboratif lansekap Hutan Lindung Sungai Lesan dan Hutan Lindung Gunung Menyapa. Mitra lain di Berau dan di Delta Mahakam Kutai Kartanegara melakukan konservasi mangrove yang merupakan habitat dari Bekantan. Di Kutai Timur mitra Yasiwa – Ulin melakukan konservasi habitat budaya badas, bangau storm, dan bekantan. Di Kabupaten yang sama mitra Wehea Petkuq melakukan upaya konservasi habitat orang utan di Hutan Lindung Huliwa.



Gambar 5. Skema intervensi penyelamatan 11 jenis satwa liar *flagship*

Terkait dengan *outcome 2* pengembangan ekonomi, hingga 2021 sebanyak 4580 orang telah dilibatkan dalam berbagai inisiatif ekonomi seperti pengembangan usaha madu, tengkawang, perbaikan produksi karet, produksi tenun dan pewarna alam, kerajinan, usaha kerupuk, ekowisata, agroforestri, pertanian, perikanan, dan ternak. Dari total jumlah tersebut di tahun 2021, sebanyak 275 orang dilibatkan dalam inisiatif ekonomi madu klulut dan minyak kayu putih, tengkawang, sirup dan selai mawang, perikanan mangrove dan produknya baik dalam kondisi segar maupun beku. Namun demikian belum dapat disampaikan kontribusi inisiatif ekonomi pada besaran pendapatan keluarga sesuai indikator program, sebagaimana telah diurai dalam laporan tahun sebelumnya. Jumlah dan jenis produk ekonomi yang dikembangkan mitra dalam 8 klaster produk sebagaimana Gambar 6. Total produk yang dikembangkan hingga 2021 berjumlah 130 dengan 111 produk dapat dikategorikan sebagai hasil hutan bukan kayu, sementara sisanya 19 site ekowisata. Tidak berbeda dengan tahun sebelumnya klaster produk dominan ditunjukkan pada bar makanan dan minuman, wanatani, dan site ekowisata yang setidaknya menunjukkan pemikiran atau *preferensi* mitra dan/atau masyarakat pada produk ramah lingkungan yang memiliki peluang ekonomi untuk dikembangkan.



Gambar 6. Jumlah dan klaster jenis produk ekonomi yang dikembangkan

Berbagai kegiatan konservasi mitra secara langsung dan tidak langsung berkontribusi pada penjagaan dan peningkatan cadangan karbon. Kegiatan yang secara umum dapat dikategorikan sebagai aksi mitigasi seperti pengajuan legalitas kawasan, pengaturan tata guna lahan, penanaman/pengkayaan tanaman, pengamanan/patroli kawasan, pencegahan kebakaran hutan, instalasi panel surya dan pengomposan dilaksanakan oleh mitra TFCA Kalimantan. Hingga 2021 luas hutan dan ekosistem yang dipertahankan oleh mitra TFCA Kalimantan seluas 572.062,23 ha, sementara luas lahan yang direhabilitasi atau dilakukan pengkayaan seluas 940,81 ha. Dari total luas hutan dan ekosistem yang dipertahankan intervensi mitra di 2021 sebesar 214.484,68 ha, dan luas penanaman 7 ha. Hasil evaluasi lingkungan AKATIGA dengan menggunakan pendekatan *proxy* mengestimasi 29,16 juta ton cadangan karbon telah diselamatkan oleh mitra TFCA Kalimantan. Sementara potensi cadangan karbon yang diciptakan dari kegiatan penanaman sebesar 84 ribu ton. Untuk mendapatkan angka pasti, di 2021 sebagaimana disampaikan dalam bagian jasa profesional, administrator melakukan pengadaan jasa konsultan untuk melihat kontribusi penurunan emisi GRK dari mitra di Berau terhadap target PKHB. Hingga Desember 2021 proses penghitungan masih dilakukan dan direncanakan akan selesai di Februari 2022.

Berbagai pelatihan, workshop, seminar mengangkat isu konservasi dan pengelolaan SDA terkait proyek dilaksanakan oleh mitra baik secara langsung maupun daring. Total jumlah orang yang dilibatkan hingga 2021 sebanyak 136.509 orang. Jumlah tersebut meningkat ribuan kali lipat dari jumlah dalam laporan sebelumnya dikarenakan banyaknya kegiatan mitra di 2020 dan 2021 dilakukan secara daring dan efektif meningkatkan jumlah partisipan. Sementara total jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya hingga 2021 sebanyak 158 kelompok, dengan 18 kelompok masyarakat dilakukan pendampingan di tahun 2021. Beberapa kegiatan peningkatan/penguatan kapasitas yang dilakukan mitra di 2021 diantaranya pelatihan patroli; pelatihan pertanian organik; pelatihan teknik penanaman, pelatihan tambak ramah lingkungan; dan pelatihan penguatan kelembagaan; perencanaan, serta pengelolaan ekowisata.

Sepanjang implementasi proyek siklus 1, 2, 3, 4 dan 5, pendampingan terkait teknis dan keuangan proyek dilakukan oleh administrator dan TAP/fasilitator kabupaten kepada 80 proyek

dengan 71 mitra pelaksana<sup>7</sup>. Pada tahapan perencanaan proyek, administrator dan TAP/fasilitator kabupaten membantu mempertajam analisa masalah proyek, penyusunan logframe dan performance monitoring plan (PMP), serta penyusunan anggaran. Sementara pada tahapan implementasi proyek, hal-hal terkait pengadministrasian keuangan proyek dipantau dan didampingi oleh TAP/fasilitator kabupaten, sebelum validasi terakhir oleh administrator. Dalam pelaksanaan teknis proyek, TAP/fasilitator kabupaten berperan membantu meningkatkan kapasitas mitra dan kualitas implementasi dengan fasilitasi diskusi kelompok, pemantauan-evaluasi, dan komunikasi dengan stakeholder di tingkat kabupaten/provinsi. Dari semua proses pelaksanaan proyek, audit keuangan menjadi bagian yang melekat dengan semua mitra TFCA memiliki pengalaman audit keuangan lembaga, yang berguna bagi portofolio lembaga untuk mendapatkan proyek baru dari donor lain. Melanjutkan inisiatif tahun sebelumnya di 2021 pendampingan mitra di Berau oleh Pokja PKHB dirumusakan mendasarkan pada hasil penilaian tools PERANTI dan PSDABM.

Dari semua pendampingan dan pengutang kapasitas yang dilakukan oleh TFCA Kalimantan tidak semua proyek berjalan dengan baik, terdapat beberapa proyek yang dihentikan karena pelaksanaanya tidak sesuai standar kinerja yang disepakati bersama administrator. Hingga Desember 2021, TFCA Kalimantan berhasil dan dalam proses melakukan peningkatan kapasitas LSM/KSM dalam pengelolaan proyek dengan baik kepada 67 lembaga, dengan diantaranya 32 lembaga masih bekerja di 2021<sup>8</sup>.

Dalam pelaksanaan kegiatan mitra penyusunan kebijakan baru, penyempurnaan, ataupun operasionalisasi kebijakan terkait sumber daya alam baik ditingkat desa/kabupaten/provinsi/kementerian menjadi bagian tak terpisahkan dari aktifitas para mitra. Hingga Desember 2021, sebanyak 165 kebijakan dihasilkan/disempurnakan oleh proyek mitra. Tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, dominasi tingkatan kebijakan yang dihasilkan/disempurnakan berada pada tingkat tapak seperti Peraturan Desa (Perdes)/Peraturan Kampung (Perkam), SK Kepala Desa/SK Kepala Kampung (Gambar 7). Sebagaimana disampaikan oleh evaluator Bumi Raya dan AKATIGA, kekuatan proyek mitra TFCA berada pada tingkat tapak, dan memiliki tantangan dalam membangun sinergitas dari tapak ke skala kabupaten atau lansekap termasuk payung kebijakan dari tingkat tapak ke tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Jumlah kebijakan yang dihasilkan/disempurnakan sebagaimana table 5.

---

<sup>7</sup> Dari 80 proyek yang telah dan sedang di dukung TFCA Kalimantan, terdapat 9 lembaga sebagai pelaksana proyek dalam 2 siklus yang berbeda yaitu: Kompakh, Lekmalamin, Kerima Puri, JALA, Kanopi, PRCF, YPB, Penabulu, Menapak.

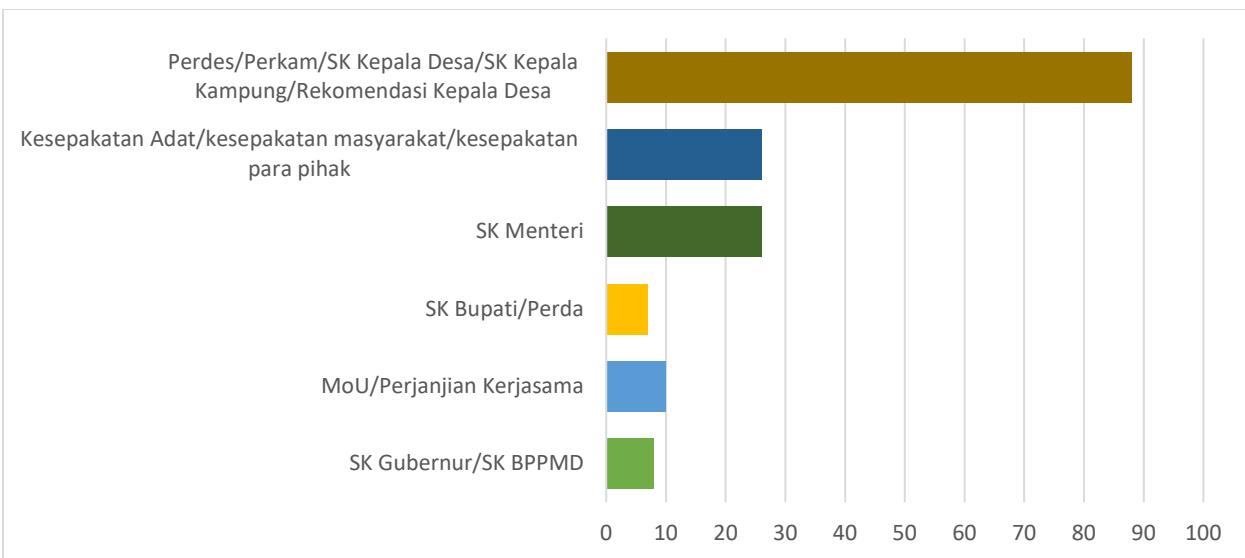
<sup>8</sup> Dari 67 lembaga administrator masih melakukan pendampingan kepada 32 lembaga yang masih bekerja dan dilakukan pendampingan termasuk proses audit di 2021, dengan pengecualian 1 lembaga (Konphalindo – DIAL) tidak dapat dikategorikan dapat melakukan pengelolaan proyek dengan baik karena dalam proses peninjauan kembali kerjasama terkait masalah internal konsorsium dan *fraud* keuangan.

Tabel 5. Jumlah dan jenis kebijakan yang dihasilkan dan/atau disempurnakan hingga 2021<sup>9</sup>

No	Jenis Kebijakan	Di 2021	Hingga 2021
1	SK Gubernur/SK BPPMD	6	8
<b>Keterangan:</b> Mitra TFCA Kalimantan menindaklanjuti SK Gubernur/SK BPPMD tentang pengelolaan HD dan Forum KEE Wehea-Kelay			
2	MoU/Perjanjian Kerjasama	3	10
<b>Keterangan:</b> MoU/Perjanjian Kerjasama antara Balai TNDS dengan APDS dan AOI, MoU dengan pihak swasta terkait pengelolaan usaha madu dan karet, serta PKS penegakan hukum dan penanganan peredaran illegal satwa liar <sup>10</sup> . Di 2020 terdapat 3 PKS baru yaitu: kerjasama DKP Prov. Kaltim dengan kelompok pengelola mangrove di KKP3K KPDS di Tabalar Muara dan Sumurut serta PKS Ka Balai Besar TNBK dan DS, dan Direktur YRJAN. Dua PKS dengan DKP Prov. Kaltim masih dilakukan intervensi di 2021.			
3	SK Bupati/Perda	5	7
<b>Keterangan:</b> Mitra memfasilitasi terbitnya SK Bupati penetapan sentra madu, operasionalisasi SK Kawasan Lindung dan Mangrove Sigending, serta SK Bupati pencadangan kawasan konservasi perairan habitat pesut mahakam. Di Berau, mitra dan administrator memfasilitasi terbitnya Perda perlindungan mangrove di kawasan APL.			
4	SK Menteri	13	26
<b>Keterangan:</b> 1 SK Menteri ESDM tentang KBAK di Kutai Timur, serta 25 SK Menteri terkait ijin perhutanan sosial (HD, Hutan Adat, dan Kemitraan).			
5	Kesepakatan adat/kesepakatan masyarakat/kesepakatan para pihak	1	26
<b>Keterangan:</b> Berbagai kesepakatan adat/masyarakat/para pihak terkait perlindungan/kesepakatan ruang, aturan pengelolaan SDA, organisasi kelompok, dan pengaturan hasil ekonomi.			
6	Perdes/Perkam/SK Kepala Desa/SK Kepala Kampung	1	88
<b>Keterangan:</b> Berbagai peraturan ditingkat desa/kampung terkait perlindungan/kesepakatan ruang, pengelolaan SDA, organisasi kelompok, penganggaran, dan pengaturan hasil ekonomi.			
<b>TOTAL</b>		<b>28</b>	<b>164</b>

<sup>9</sup> Penyempurnaan kebijakan dalam konteks Rencana Implementasi TFCA Kalimantan dan laporan ini termasuk: revisi kebijakan, operasionalisasi kebijakan/tindaklanjut kebijakan, dan penerbitan aturan turunan.

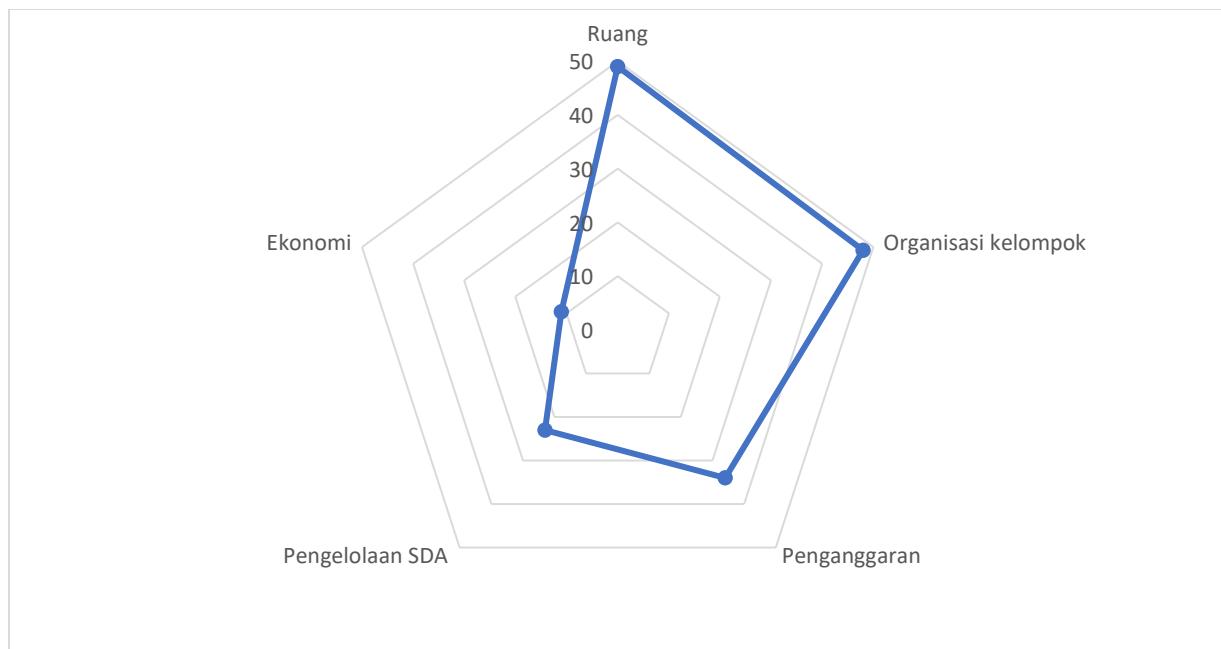
<sup>10</sup> PKS penegakan hukum dan penanganan peredaran illegal satwa liar dilakukan 2017, namun verifikasi dokumen dilakukan di 2020.



Gambar 7. Jumlah dan jenis kebijakan yang dihasilkan dan/atau disempurnakan

Konstruksi data dari 165 kebijakan yang dihasilkan dan/atau disempurnakan mitra menunjukkan pola yang selaras dengan skenario umum keberlanjutan proyek dengan, 3 sektor merupakan kondisi pemungkin: ruang, organisasi kelompok, dan pengelolaan/pengaturan SDA; dan 2 sektor terkait pendanaan: penganggaran dan ekonomi<sup>11</sup>. Dengan demikian dapat diasumsikan, jika variasi kebijakan yang dihasilkan membentuk pola pentagon yang proporsional atau seimbang, semestinya proyek mitra dapat berlanjut. Namun demikian, pola kebijakan yang dihasilkan menunjukkan bentuk yang tidak proporsional dimana dominasi sektor kebijakan terkonsentrasi pada sektor ruang, organisasi kelompok, dan penganggaran. Sementara pengelolaan SDA dan ekonomi menjadi sektor kebijakan dengan jumlah yang sangat sedikit. Hal ini konsisten dengan hasil evaluasi KLHK dan evaluator AKATIGA, dimana persoalan keberlanjutan proyek menjadi persoalan yang perlu mendapatkan penekanan dalam implementasi program.

<sup>11</sup> Dalam pertemuan *sharing* informasi hasil proyek dan pembelajaran mitra-mitra USAID pada 19 Desember 2018, *exit strategy*, strategi keberlanjutan yang banyak diterapkan meliputi: (1) formalisasi / legalisasi kebijakan kondisi pemungkin. (2) memastikan adanya dukungan anggaran untuk implementasi rencana pasca proyek. (3) memastikan *ownership* lokal pada proyek dengan partisipasi secara baik dalam setiap langkah proyek. (4) peningkatan kapasitas pemerintah, swasta, LSM dan masyarakat lokal untuk menanamkan nilai-nilai yang dipromosikan proyek, (5) pengembangan skema bisnis / enterprise baik dengan perdagangan atau PES, (6) integrasi proyek dengan skema proyek lain, bisnis atau kebijakan pemerintah, dan pengembangan skema PPP (*public private partnership*). Sementara laporan evaluator AKATIGA mengidentifikasi 5 aspek keberlanjutan yaitu: keberlanjutan kelembagaan, keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan logistik.



Gambar 8. Jumlah dan sektor kebijakan yang dihasilkan dan/atau disempurnakan

### 5.1.2. Capaian Milestone Program

Milestone program TFCA Kalimantan menetapkan 4 platform program dengan 11 sub program sebagai stepstone untuk mencapai 4 outcome. Masing-masing sub program memiliki target indikatif tahun 2021. Detil program dan target indikatif dapat dilihat dalam lampiran rencana implementasi 2018-2022.

Sampai dengan Desember 2021, dari target indikatif 96.000 ha luas hutan dan 4 tipe ekosistem dilindungi melalui skema legalitas formal perlindungan, kinerja mitra TFCA Kalimantan sudah melebihi empat kali dari target dengan 572.062,23 ha area terlindungi. Sementara dari target indikatif 4 tipe ekosistem, kinerja mitra telah mendapatkan 5 tipe ekosistem.

Selanjutnya dari target indikatif 40 individu satwa liar (dan/atau jenis tumbuhan) berhasil diselamatkan dan/atau dilepasliarkan, mitra TFCA Kalimantan hingga 2021 telah melakukan aksi pelepasliaran dan/atau rescue 136 satwa liar melalui dukungan kepada mitra maupun BKSDA Kalbar. Secara kuantitatif target indikatif telah melampui dari target.

Untuk target indikatif data identifikasi, inventarisasi, investigasi peredaran illegal, pemantauan, penyelamatan 9 jenis tumbuhan dan satwa liar yang langka, endemik, dan/atau terancam punah; hingga 2021 telah dilakukan beragam aksi konservasi terhadap 11 jenis satwa liar flagship Kalimantan, dengan demikian kontribusi mitra telah tercapai penuh.

Terkait dengan target indikatif penanganan kasus peredaran illegal tumbuhan dan/atau satwa liar yang langka, endemik, dan/atau terancam punah meningkat 4%; secara khusus pada siklus 3 Mitra Titian di Kalimantan Barat melakukan investigasi peredaran tumbuhan dan satwa liar untuk semua spesies<sup>12</sup>. Dalam kurun waktu 3 tahun proyek (2017-2020), dari 41 kasus penanganan

<sup>12</sup> Data investigasi yang dilakukan oleh mitra Titian di Kalimantan Barat mencakup semua satwa liar yang beredar secara illegal termasuk 11 spesies kunci.

peredaran illegal tumbuhan dan satwa liar oleh penegak hukum, mitra Titian mendukung 16 kasus penanganan<sup>13</sup>. Dengan asumsi satu-satunya faktor peningkatan penanganan kasus oleh penegak hukum adalah dari Titian dan jumlah penanganan kasus tetap sebelum proyek, maka kontribusi Titian terhadap peningkatan penanganan kasus peredaran illegal satwa liar adalah sebesar 64%<sup>14</sup>. Capaian proyek Titian selama tiga tahun telah memenuhi target indikatif milestone 2021.

Target indikatif program II di 2021 adalah 8 jenis HHBK dan/atau jasling dikembangkan, dan menjadi sumber ekonomi masyarakat, serta 800 KK meningkat pendapatannya sebesar 4%. Dari target tersebut mitra telah mengembangkan inisiatif 130 jenis produk yang terdiri dari 111 produk HHBK dan 19 site ekowisata. Secara kuantitas capaian mitra TFCA telah jauh melebihi target indikatif yang ditetapkan. Namun demikian bagaimana capaian tersebut berkontribusi pada pendapatan keluarga belum dapat disampaikan mengingat keterbatasan baseline data dan kapasitas mitra dalam mengukur dampak, serta tidak terpenuhinya prakondisi utuh dalam teori perubahan ekonomi sebagaimana disampaikan dalam laporan tahun 2020.

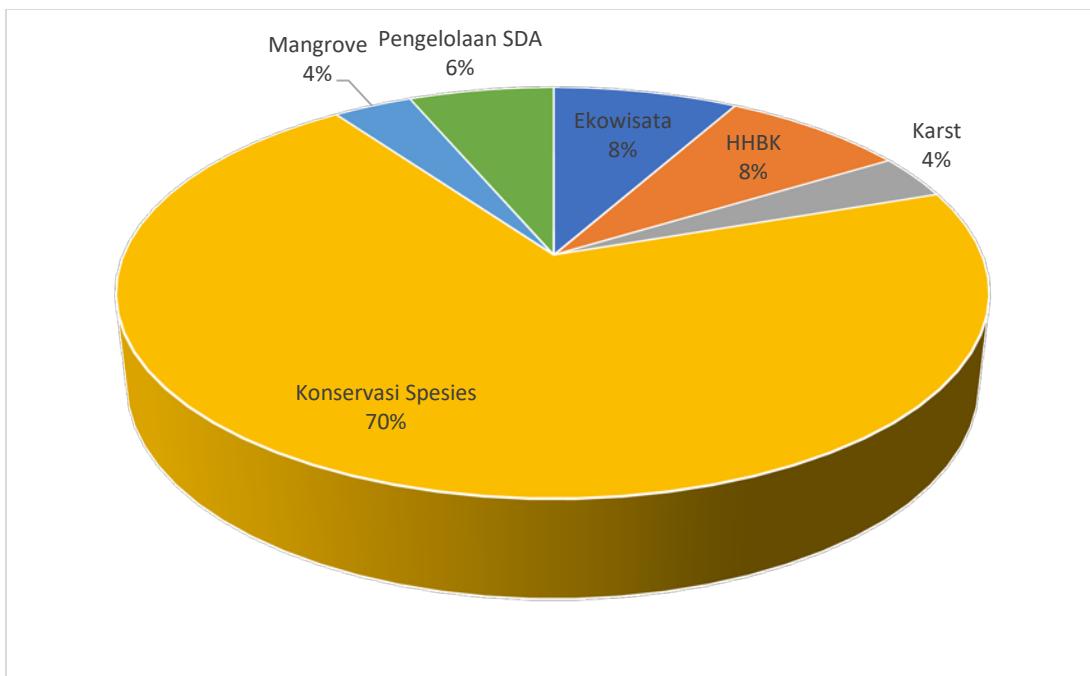
Pada target indikatif 96.000 ha tutupan hutan dipertahankan telah dicapai 572.062,23 ha. Sedangkan target indikatif ke dua dari 800 ha lahan yang direhabilitasi telah tercapai 940,81 hektar atau 18% lebih besar dari target. Dari target indikatif ke tiga, 5 aksi mitigasi telah dilaksanakan 7 kegiatan aksi mitigasi yaitu: pengajuan legalitas kawasan, pengaturan tata guna lahan, penanaman/pengkayaan lahan, pengamanan kawasan, pencegahan kebakaran hutan, pengomposan, dan instalasi panel surya. Hingga 2021, hasil evaluasi lingkungan AKATIGA, dengan menggunakan pendekatan proxy, mengestimasi 29,16 juta ton cadangan karbon telah diselamatkan dari barbagai inisiatif mitra. Sementara potensi cadangan karbon yang diciptakan dari kegiatan penanaman sebesar 84 ribu ton. Sebagaimana diulas pada bagian sub bab jasa konsultan, di 2021-2022 dilakukan pengukuran kontribusi mitra TFCA Kalimantan di Berau pada target PKHB dengan hasil yang akan disampaikan pada laporan tahun 2022.

Untuk target indikatif penerbitan 40 artikel dan 8 buku pembelajaran proyek, hingga 2021 telah terbit 172 artikel; dan 5 buku pembelajaran dengan isu: madu organik, tenun dan pewarna alam, konservasi spesies, kearifan lokal masyarakat, dan upaya penanganan peredaran ilegal satwa liar. Secara kuantitatif capaian penulisan artikel 4 kali dari target. Sementara untuk buku pembelajaran baru belum tercapai. Terkait dengan artikel menjadi catatan penting terkait proporsional isu mengingat 70% artikel mangangkat konservasi spesies sementara isu yang lain masih minim (Gambar 9).

---

<sup>13</sup> Dukungan penanganan kasus yang dilakukan mitra Titian meliputi: pulbaket, operasi penangkapan, bantuan penyelidikan, dan penyidikan.

<sup>14</sup> Dari laporan proyek dan konfirmasi Titian dengan penegak hukum tidak ada baseline penanganan kasus sebelum 2017.



Gambar 9. Persentase kategori isu artikel terkait proyek yg dipublikasikan oleh media<sup>15</sup>

Hingga Desember 2021, dari target 17 film terkait pembelajaran proyek diproduksi, hanya diproduksi 2 film terkait pembelajaran yaitu “” dan “Harapan Baru Rangkong Gading”. Capain milestone ini belum tercapai. Dengan demikian masih diperlukan dukungan administrator kepada mitra dalam pembuatan film pembelajaran.

Untuk target indikatif peningkatan kapasitas dalam pengelolaan SDA kepada 7200 orang dan 155 kelompok masyarakat, hingga Desember 2021 telah tercapai 136.509 orang dan 158 kelompok masyarakat. Secara kuantitatif jumlah orang dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam peningkatan kapasitas proyek mitra telah jauh melebih target indikatif. Besarnya jumlah tersebut terkait dengan pandemi covid yang memaksa banyak kegiatan yang dilakukan secara daring dan secara signifikan meningkatkan partisipasi.

Selanjutnya dari target indikatif 75 LSM/KSM mampu melakukan pengelolaan proyek konservasi dengan baik, hingga tahun 2021, TFCA Kalimantan mendampingi 80 proyek dengan 71 mitra pelaksana LSM/KSM<sup>16</sup>. Dalam proses hibah tidak semua proyek berjalan dengan baik, dan terdapat beberapa proyek yang dihentikan mengingat pelaksanaannya tidak sesuai sebagaimana standar kinerja yang disepakati bersama. Dari total pelaksana hibah, terdapat 67 LSM/KSM yang mampu melakukan pengelolaan proyek konservasi dengan baik, dengan 32 diantarnya masih berproses melalui siklus 5 dan dilakukan pendampingan. Dengan demikian capaian hingga 2021 belum sepenuhnya tercapai. Mitra yang masih berproses juga belum dapat dinilai dengan

<sup>15</sup> Analisa artikel mendasarkan kriteria: (1) tidak *double counting*, (2) ditampilkan dalam website media (nasional/provinsi/kabupaten/lokal) dan bukan blog personal, (3) statemen berita menyebut kegiatan mitra/nama mitra/TFCA Kalimantan, (4) tanggal berita setelah masa kontrak atau tidak sebelum masa kontrak, (5) pesan berita konsisten dengan pesan Rencana Implementasi Program TFCA Kalimantan.

<sup>16</sup> Enam lembaga pelaksana merupakan pelakana sama dalam siklus proyek yang berbeda yaitu: Penabulu, Komphakh, JALA, Kanopi, Lekmalamin dan Kerima Puri.

penilaian berhasil atau tidak karena masih berproses kecuali mitra siklus 5 yang terdapat fraud dan tidak dimasukan dalam perhitungan tersebut.

Terakhir, pada target indikatif jumlah kebijakan dihasilkan dan/atau disempurnakan, dari target 110 kebijakan, telah tercapai lebih dari setengahnya dengan 165 kebijakan dihasilkan/disempurnakan. (Tabel 5 dan Gambar 7 dan Gambar 8).

Diperbandingkan dengan periode pertama Rencana Implementasi 2013-2017, dapat disampaikan beberapa data perbandingan capaian periode ke dua Rencana Implementasi sebagaimana sebagai berikut. Untuk pencapaian pada target indikatif luas hutan dan tipe ekosistem dilindungi, terdapat peningkatan sebesar 2,5 kali yaitu 572.062,23 ha, dimana pencapaian hingga 2017 adalah sebesar 185.625 hektar. Sementara untuk tipe ekosistem yang dilindungi, terdapat penambahan satu tipe ekosistem mangrove. Untuk jumlah jenis satwa liar yang berhasil diselamatkan dan/atau dilepasliarkan, terdapat peningkatan lima kali lipat dari capaian di 2017. Sementara untuk spesies kunci yang diintervensi terdapat penambahan 7 jenis spesies flagship Kalimantan: pesut, gajah, arwana, rangkong, buaya badas, bangau storm, dan langur borneo; dari periode sebelumnya hanya 4 spesies flagship: orangutan, badak sumatra, banteng dan bekantan<sup>17</sup>.

Untuk inisiatif ekonomi, terdapat peningkatan hampir 1,5 kali lipat dari 41 jenis HHBK dan 11 site ekowisata di Periode I Rencana Implementasi menjadi 111 jenis HHBK dan 19 site ekowisata hingga saat ini. Sementara dari jumlah masyarakat yang terlibat aktif dalam berbagai inisiatif ekonomi terdapat peningkatan 1,5 kali dari 2.809 orang menjadi 4.580 orang. Berikutnya untuk tutupan hutan yang dipertahankan terdapat peningkatan 1,5 kali lipat dari 185.625 ha menjadi 572.062,23 ha. Peningkatan sedikit terjadi pada luas lahan rehabilitasi dari 780,71 ha menjadi 940,81 ha.

Terakhir untuk target indikatif tata kelola, terdapat penambahan jumlah publikasi artikel di media dari 23 artikel di periode pertama Rencana Implementasi, menjadi 172 artikel hingga saat ini dengan penambahan 2 buku pembelajaran dari 3 menjadi 5. Dari target film pembelajaran, terdapat penambahan 1 film pembelajaran terkait rangkong gading dari mitra YRJAN. Sementara dari jumlah masyarakat dan kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas melalui kegiatan proyek terdapat lonjakan peningkatan dari periode sebelumnya dari 5.542 orang menjadi 136.509 orang. Sementara untuk kelompok masyarakat dampingan peningkatan sebesar 20% dari 128 menjadi 158. Terdapat peningkatan jumlah pelaksana KSM/LSM yang mampu melaksanakan proyek konservasi dengan baik, dari 35 menjadi 67. Sedangkan dari jumlah kebijakan yang dihasilkan/disempurnakan terdapat peningkatan dua kali lipat kebijakan dari 70 kebijakan menjadi 165.

---

<sup>17</sup> Identifikasi habitat dan spesies pesut telah dimulai tahun 2017 di Kubu Raya, namun temuan individu baru didapat pada tahun 2018, selanjutnya proyek YK RASI pada tahun 2018 melalukan intensifikasi aksi konservasi pesut di Sungai Mahakam.

## 5.2. Analisis Capaian Indikator dan Milestone Program TFCA Kalimantan

### 5.2.1. Kontribusi Capaian Indikator Pada Program HoB dan PKHB

Logframe IP 2018-2022 merupakan hasil integrasi tujuan program TFCA Kalimantan dengan renstra program HoB dan PKHB. Dengan demikian segala capaian pada logframe berkontribusi pada program HoB dan PKHB. Namun demikian tidak semua sasaran program HoB dan PKHB disasar oleh TFCA Kalimantan.

Dalam pelaksanaan program, selain dukungan yang sifatnya implementatif melalui proyek mitra, administrator juga mendukung kegiatan HoB dan PKHB yang bersifat kondisi pemungkin.

Dalam penyusunan renstra PKHB administrator memfasilitasi dan berpartisipasi memberi masukan diskusi pembaharuan renstra. Dalam setiap pelaksanaan Trilateral Meeting HoB, administrator memfasilitasi penyiapan dan diskusi data dan informasi. Terkait dengan HoB mengingat belum jelaskan keberlanjutan inisiatif dan *hub* koordinasi HoB (Pokjanas) belum ada dukungan lebih lanjut terkait HoB dalam dua tahun belakangan.

Pelingkupan kontribusi untuk program HoB dan PKHB dalam konteks laporan ini mendasarkan pada cakupan geografis kabupaten proyek: kabupaten Berau untuk program PKHB; dan Kapuas Hulu, Kutai Barat dan Mahakam Ulu program HOB. Sementara diluar kabupaten tersebut akan dikategorikan sebagai Investasi Strategis, meskipun tetap mendukung dua program tersebut. Pelingkupan tersebut, selain menunjukkan besaran hasil program juga berkorelasi dengan alokasi anggaran pendanaan TFCA Kalimantan untuk dua program tersebut<sup>18</sup>. Berikut merupakan gambar kontribusi capain program TFCA untuk program HoB dan PKHB (**Error! Reference source not found.**).

---

<sup>18</sup> Analisa kontribusi TFCA Kalimantan pada renstra program HoB dan PKHB dilaporkan administrator pada Laporan Tahun 2017 dan Tengah Tahun 2018. Di tahun 2018, administrator bersama konsultan melakukan kajian “refleksi integrasi program TFCA Kalimantan pada PKHB dan HoB”, hasil kajian menjadi dasar pembaharuan Recana Implementasi program yang baru, serta acuan dukungan dua program tersebut.



# 2021

## Kontribusi Capaian Program TFCA Untuk Program HoB dan PKHB

**3.273 orang terlibat**  
dalam pengembangan 50 jenis produk ekonomi

HoB

**PKHB**  
**841 orang terlibat**  
dalam pengembangan 63 jenis produk ekonomi

IS

**466 orang terlibat**  
dalam pengembangan 17 inisiatif ekonomi

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Hutan

**130.688 orang dan 123 kelompok masyarakat**  
meningkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan SDA

**85 kebijakan SDA didukung**

HoB

PKHB

**2.231 orang dan 23 kelompok masyarakat**  
meningkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan SDA

**68 kebijakan SDA didukung**

IS

**3.468 orang dan 12 kelompok masyarakat**  
meningkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan SDA

**12 kebijakan SDA didukung**

Perbaikan tata kelola sektor kehutanan dan perlindungan keanekaragaman hayati

### 5.2.2. Analisa Result Chain Program

Rencana Implementasi 2018-2022, memberikan panduan pemantauan dan evaluasi logframe dan indikator program secara kuantitatif dan kualitatif. Panduan kuantitatif ditetapkan pada milestone capaian sebagaimana telah diurai pada bagian 5.1.1. Sementara untuk panduan kualitatif diuraikan pada matrik *result chain*. Berikut merupakan uraian analisis kualitatif mendasarkan *result chain* program.

Sebagaimana telah diurai diatas, pencapaian 4 *outcome* program dicapai melalui 4 platform program dan 11 sub program milestone. Untuk melihat sisi kualitas program ditetapkan indikator project, dan *intermediate*-nya (lihat matrik result chain IP Program 2018-2022).

Dari capaian 7 skema perlindungan dengan luas kawasan 572.062,23 ha beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

- a) pengembangan skema perhutanan sosial

Indikator output project	Analisa capaian	Indikator intermediate outcome	Analisa capaian
1. Adanya legalitas pengelolaan dan perlindungan hutan/ ekosistem penting oleh masyarakat.	1. Hampir semua legalitas pengelolaan PS telah diterima oleh masyarakat dan memunculkan kesadaran ruang serta rasa memiliki hutan <sup>19</sup> .  2. Untuk melatih LPHD mampu melakukan pengelolaan hutan/ekosistem di siklus 5 administrator melanjutkan dukungan pendanaan hibah kepada LPHD/LPHA dan mitra pendamping LPHD/LPHA. Untuk penguatan kelembagaan administrator memfasilitasi <i>sharing session Juknis Pengelolaan PS</i> dan tools Peranti – PSDABM bersama mitra, dengan juga mediskusikan kriteria keberhasilan kelembagaan.	1. Tata batas pengelolaan hutan disepakati para pihak.  2. Sengketa tata batas pengelolaan hutan berkurang.  3. Masyarakat memiliki legalitas akses terhadap sumber daya hutan/alam.	1. Identifikasi tata batas, pembuatan blok, dan penyeprakatanya dengan masyarakat desa menjadi usulan kegiatan LPHD yang disupport TFCA Kalimantan di siklus 5. Beberapa LPHD di Kutai Barat dan Mahakam Ulu telah melakukan tata batas dengan dukungan dari TFCA Kalimantan dan ADD.  2. Sebagian LPHD mengalami masalah tata batas ijin HD dengan desa lainnya karena perubahan atau penyesuaian deliniasi administratif desa. Masalah ini telah disampaikan ke KPH dan Kabalai PSLK Wilayah Kalimantan dengan opsi mengadopsi satu ijin untuk dua desa dengan dua LPHD dalam pengelolaan kolaboratif.  3. Legalitas akses ruang telah didapat oleh masyarakat, Namun agar hasil hutan menjadi produk ekonomi diperlukan legalitas lain seperti: ijin terkait provisi SDH, ijin PIRT dan BPOM. Perijinan menjadi bagian lingkup
2. Adanya lembaga yang ditunjuk dan mampu dalam melakukan pengelola hutan/ekosistem penting.	5 administrator melanjutkan dukungan pendanaan hibah kepada LPHD/LPHA dan mitra pendamping LPHD/LPHA. Untuk penguatan kelembagaan administrator memfasilitasi <i>sharing session Juknis Pengelolaan PS</i> dan tools Peranti – PSDABM bersama mitra, dengan juga mediskusikan kriteria keberhasilan kelembagaan.	4. Kawasan hutan terkelola dan terjaga dengan baik.	3. Aktifitas review dan pembaharuan RPHD/RKHD/RKT telah menjadi bagian dari
3. Kawasan hutan/ekosistem penting dikelola dengan rencana kelola dan rencana usaha baik.			
4. Dukungan pendanaan dari		5. Potensi hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan terkelola dengan baik dan legal.	

<sup>19</sup> Hasil evaluasi AKATIGA dengan melihat kasus Sampan dan Payo-Payo.

Indikator output project	Analisa capaian	Indikator intermediate outcome	Analisa capaian
<b>RPJM/pendanaan swasta/lembaga donor lain.</b>	<p>aktifitas mitra di siklus 5. <i>Benchmarking</i> rencana kelola dan usaha yang baik mendasarkan pada seri 2 dan 3 Juknis pengelolaan PS BPSKL.</p> <p>4. Untuk memfasilitasi pendanaan lanjutan, TAP/Fasilitator/Administrator terus mempromosikan inisiatif PS mitra kepada pemerintah desa, KPH, OPD, BPSKL Kalimantan, dan Dit. PSKL dengan harapan ada dukungan lanjutan. Dalam perencanaan proposal HD siklus 5, administrator mengundang perwakilan pemerintah desa untuk hadir membuat perencanaan bersama sebagai salah satu strategi agar desa dapat memberikan dukungan pendanaan ke inisiatif PS. Pokja PKHB menjalin komunikasi dengan donor lain seperti GIZ untuk membuka peluang pendanaan baru bagi mitra. Mitra PRCF mengintegrasikan insentif karbon SCCM dengan inisiatif PS sebagai strategi kelanjutan pendanaan. Dalam konteks pemantauan dan evaluasi, <i>stakeholder</i> seperti KPH akan dilibatkan sebagai bagian strategi untuk mendapatkan dukungan pendanaan lanjutan.<sup>20</sup></p>	<p>6. Keberlanjutan pendanaan inisiatif PS.</p>	<p>pekerjaan TAP/fasilitator kabupaten.</p> <p>4. <i>Benchmarking</i> pengelolaan hutan yang baik akan mendasarkan pada kriteria Juknis PS BPSKL yang masih dalam proses implementasi mitra siklus 5.</p> <p>5. Identifikasi potensi, penilaian kelayakan usaha, dan penyusunan rencana usaha, perijinan usaha, akan menjadi bagian aktifitas mitra pengelola/pendamping PS siklus 5.</p> <p>6. Untuk memfasilitasi pendanaan lanjutan, TAP/Fasilitator/Administrator terus mempromosikan inisiatif PS mitra kepada pemerintah desa, KPH, OPD, BPSKL Kalimantan, dan Dit. PSKL dengan harapan ada dukungan lanjutan. Dalam perencanaan proposal HD siklus 5, administrator mengundang perwakilan pemerintah desa untuk hadir membuat perencanaan bersama sebagai salah satu strategi agar desa dapat memberikan dukungan pendanaan ke inisiatif PS. Pokja PKHB menjalin komunikasi dengan donor lain seperti GIZ untuk membuka peluang pendanaan baru bagi mitra. Mitra PRCF mengintegrasikan insentif karbon SCCM dengan inisiatif PS sebagai strategi kelanjutan pendanaan. Dalam konteks pemantauan dan evaluasi, <i>stakeholder</i> seperti KPH akan dilibatkan sebagai bagian strategi untuk mendapatkan dukungan pendanaan lanjutan.</p>

<sup>20</sup> Pokja PKHB telah menuangkan strategi *stakeholder engagement* dalam proposal pendampingan di 2021. Hasil dari implementasi tersebut dapat digunakan administrator untuk menyusun desain strategi stakeholder engagement agar langkah-langkah kerja lebih sistematis dan terpantau dengan baik.

- b) perlindungan hutan dan ekosistem penting di APL dengan berbagai skema legalitas (SK Menteri, SK Bupati, Perdes dll)

Indikator output project	Analisa capaian	Indikator intermediate outcome	Analisa capaian
1. Adanya legalitas pengelolaan dan perlindungan hutan/ekosistem penting.	1. Sejumlah legalitas perlindungan ruang telah didapatkan oleh mitra. Beberapa tambahan baru di 2021 seperti pencadangan lokasi KKP3K di Teluk Balikpapan.	1. Hutan/ekosistem penting memiliki rencana pengelolaan yang disepakati bersama.	1. Beberapa rencana pengelolaan telah disepakati bersama para pihak, sementara yang lain masih dalam proses penyepakatan <sup>22</sup> .
2. Adanya lembaga pengelola dan mampu melakukan pengelolaan hutan/ekosistem penting.	2. Lembaga pengelola berbasis masyarakat telah terbentuk	2. Tata batas pengelolaan hutan/ekosistem penting terkait kawasan hutan disepakati para pihak.	2. Bentuk penyepakatan tata batas bervariasi dari penyepakatan delineasi peta hingga ke <i>groundcheck</i> di lapangan. Tata batas seperti: KBAK disepakati dengan delineasi peta bersama para pihak di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. sementara tata batas KKP3K KPDS di Semurut dan Tabalar Muara telah disepakati baik dengan delineasi peta hingga <i>groundcheck</i> .
3. Kawasan hutan/ekosistem penting dikelola dengan rencana kelola baik.	3. Penguatan lembaga pengelola menjadi agenda siklus 5 seperti mitra Wehea Petkuq. Di 2021, Pokja PKHB menguji Tools Peranti dan PSDABM sebagai alat ukur dan/atau strategi <i>benchmarking</i> kapasitas lembaga dalam pengelolaan hutan/ekosistem.  3. Status dan bentuk rencana kelola bervariasi antara berupa dokumen final, dalam proses finalisasi dengan bentuk rencana kelola atau acuan kelola yang tertuang dalam naskah kerjasama atau kesepakatan	3. Masyarakat memiliki legalitas akses terhadap sumber daya hutan/alam.  4. Implementasi, monitoring, dan evaluasi kawasan hutan/ekosistem penting terkelola dan terjaga dengan baik.  5. Potensi hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan terkelola dengan baik dan legal.  6. Keberlanjutan pendanaan inisiatif pengelolaan hutan/ekosistem penting.	3. Legalitas akses ruang telah didapat oleh masyarakat, Namun agar hasil hutan/ ekosistem menjadi produk ekonomi diperlukan legalitas lain seperti: ijin PIRT dan BPOM. Perijinan menjadi bagian lingkup pekerjaan TAP/fasilitator kabupaten.  4. Kriteria kualitas hutan/ekosistem dari laporan teknis mitra seperti KSK UGM perlu dielaborasi dan dikonstruksikan menjadi panduan monitoring dan evaluasi kualitas lingkungan.  5. Identifikasi potensi hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan telah menjadi bagian dari aktifitas mitra hingga 2021. Pengelolaan potensi menjadi agenda mitra di siklus 5 <sup>23</sup> . Beberapa kajian potensi telah menjadi bagian dari rencana pengelolaan pemerintah seperti pengelolaan ekowisata karst dan habitat pesut yang telah masuk

<sup>22</sup> Rencana pengelolaan final seperti Rencana Induk Pengelolaan Karst Sangkulirang Mangkalihat, sementara RP yang dalam proses penyepakatan seperti RP Kawasan Lindung Sigending.

<sup>23</sup> Identifikasi potensi ekowisata oleh KSK UGM menjadi bagian dari rencana pengelolaan proposal siklus 5 PLAB dan Menapak. Di 2021 administrator akan memfasilitasi hasil kajian potensi oleh KSK UGM menjadi Geo Site (bagian Geo Park) untuk pengembangan ekowisata.

Indikator output project	Analisa capaian	Indikator intermediate outcome	Analisa capaian
	<p>bersama. Masih diperlukan kriteria untuk memvalidasi baik tidaknya sebuah rencana kelola<sup>21</sup>.</p>		<p>dalam draft RIPRAR-PROV Kalimantan Timur. Di Berau lokasi pengembangan wisata oleh mitra FLIM di Teluk Semanting menjadi bagian dari RIPARDA Berau.</p> <p>6. Strategi umum mendapatkan pendanaan lanjutan dilakukan mitra dengan integrasi kegiatan ke dalam rencana pemerintah seperti yg dilakukan KSK UGM dengan pemerintah provinsi Kaltim. Namun demikian pendaan dari TFCA Kalimantan tetap menjadi opsi prioritas mitra dalam melanjutkan inisiatif sebagaimana diurai oleh AKATIGA dalam laporan evaluasinya.</p>

c) konservasi tumbuhan dan satwa liar yang langka, endemik, dan/atau terancam punah

Indikator output project	Analisa capaian	Indikator intermediate outcome	Analisa capaian
<p><b>1. Data identifikasi kelayakan habitat dan/atau jumlah populasi tumbuhan/individu satwa liar.</b></p>	<p>1. Data identifikasi kelayakan habitat untuk release orangutan di DAS Mendalam, Resort Mentatai TNBBR telah dijadikan dasar pelepasliaran OU<sup>24</sup>. Data habitat rangkong dijadikan dasar titik pemantauan populasi di TNBK. Kajian kelayakan sanctuary di HLKL dijadikan dasar penetapan Suaka Badak Kelian. Di 2021 mitra</p>	<p>1. Adanya habitat baru untuk perbanyak tumbuhan dan pelepasliaran satwa.</p> <p>2. Jumlah tumbuhan yang diperbanyak/populasi satwa liar yang dilepaskan stabil.</p> <p>3. Tingkat gangguan habitat untuk perbanyak tumbuhan dan</p>	<p>1. Habitat OU di DAS Mendalam dan Resort Mentatai telah dijadikan lokasi release. Di siklus 5, melalui Fahutan Unmul akan dikaji kelayakan bentang alam Nyapa – Lessan di Berau untuk lokasi release OU.</p> <p>2. Hasil pelepasliaran OU yang dilakukan oleh YIARI</p>
<p><b>2. Tumbuhan dan satwa liar yang diperbanyak /dilepasliarkan mampu bertahan di habitat.</b></p>			

<sup>21</sup> Rencana pengelolaan *existing* seperti: Rencana Induk Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat dan RP Mangrove di Tabalar Muara dan Semurut. Acuan pengelolaan seperti PKS antara Balai TNDS dengan AOI dan APDS, dengan asumsi menjadi bagian dari Rencana Pengelolaan Balai TNDS.

<sup>24</sup> Hasil kajian kelayakan release habitat OU oleh Forina dijadikan dasar pelepasliaran SOC (Sintang Orangutan Centre). Hingga saat ini sudah 8 OU dilepasliarkan di Sub DAS dengan rincian: Tahap I November 2017 dengan 3 individu OU, Tahap II April 2018 dengan 2 individu OU; tahap III Oktober 2018 dengan 1 individu OU, dan tahap IV dengan 2 individu OU pada Juli 2019. Sumber informasi release dari Forina dan link sbb: <http://ksdae.menlhk.go.id/info/6312/rencana-pelepasliaran-orangutan-tahap-keempat-di-tn-betung-kerihun.html>.

Indikator output project	Analisa capaian	Indikator intermediate outcome	Analisa capaian
<p><b>3. Peran serta masyarakat/kinerja petugas keamanan kawasan dalam pengamanan meningkat.</b></p> <p><b>4. Adanya/menguatnya kebijakan konservasi tumbuhan dan satwa liar.</b></p>	<p>penilaian kelayakan habitat lutung borneo menjadi bagian pekerjaan Fahutan Unmul.</p> <p>2. Hasil pelepasliaran OU yang dilakukan oleh YIARI menunjukkan hampir semua individu mampu bertahan di lokasi <i>release</i> dan dua diataranya mampu <i>breeding</i>.</p> <p>3. Dalam berbagai kegiatan mitra melibatkan masyarakat dan petugas kawasan bervariasi dari pelibatan pasif dalam kampanye hingga pelibatan aktif dalam survey dan pemantauan. Di 2021, proyek ASRI berupaya menjaga peran serta masyarakat dalam upaya mendukung konservasi OU yang dilakukan oleh YIARI.</p> <p>4. Indikasi penguatan kebijakan konservasi ditunjukan dengan: (a) Ditunjuknya DAS Mendalam sebagai lokasi pelepasliaran OU oleh Balai TNBK. (b) Resort Sadap dan Resort Nanga Hovat TNBK dijadikan plot pemantauan rangkong. (c) Dibentukan Resort Suaka Badak Kelian untuk melanjutkan pengelolaan <i>sanctuary</i>. (d) RAD Badak Sumatra diterapkan sebagai kebijakan KSDAE dan mendapat dukungan dari pemerintah provinsi Kaltim. (e) Pemda Kukar menetapkan area pencadangan untuk konservasi pesut.</p>	<p>pelepasliaran satwa, kecil.</p> <p>4. Kebijakan konservasi tumbuhan dan satwa liar dapat diterapkan.</p>	<p>3. menunjukkan hampir semua individu mampu bertahan di lokasi <i>release</i> dan dua diataranya mampu <i>breeding</i>.</p> <p>4. Hingga saat ini tidak ada laporan gangguan habitat dari dua lokasi release OU di DAS Mendalam dan Resort Mentawai. Dapat diasumsikan lokasi tersebut masih aman. Proyek ASRI mendukung inisiasi YIARI dalam menjaga gangguan habitat OU nihil.</p> <p>5. Penerapan kebijakan konservasi pada tingkat tapak ditunjukan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Ditunjuknya DAS Mendalam sebagai lokasi pelepasliaran OU oleh Balai TNBK.</li> <li>(b) Resort Sadap dan Resort Nanga Hovat TNBK dijadikan plot pemantauan rangkong.</li> <li>(c) Dibentukan Resort Suaka Badak Kelian untuk melanjutkan pengelolaan suaka.</li> <li>(d) RAD Badak Sumatra diterapkan sebagai kebijakan KSDAE dan mendapat dukungan dari pemerintah provinsi Kaltim.</li> <li>(e) Pemda Kukar menetapkan area pencadangan untuk konservasi pesut.</li> </ul>

- d) mitigasi dan/atau investigasi peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar yang langka, endemik, dan/atau terancam punah.

Indikator output project	Analisa capaian	Indikator intermediate outcome	Analisa capaian
<p><b>1. Data hasil investigasi dijadikan dasar penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.</b></p> <p><b>2. Sistem pemantauan publik digunakan secara luas dan dijadikan sebagai dasar penyelidikan hukum.</b></p> <p><b>3. Partisipasi publik dalam pemantauan peredaran tumbuhan dan/atau satwa liar meningkat (laporan kasus peredaran tumbuhan dan/atau satwa liar oleh publik meningkat).</b></p>	<p>1. Data hasil investigasi Titian dan penanganan perkara telah dijadikan dasar putusan pengadilan 16 kasus kejahatan satwa liar.</p> <p>2. Mitra Titian telah merancang BWC (<i>Borneo wildlife Care</i>), sistem pemantauan satwa liar berbasis website dan android. Namun hingga saat ini belum dapat dilaporkan bahwa sistem tersebut digunakan secara luas oleh publik. Dari 41 operasi penangkapan peredaran ilegal satwa liar di Kalbar dari 2017-2019, 7 operasi bersumber dari laporan Titian, namun tidak ada informasi apakah berasal dari BWC atau hasil investigasi lapangan.</p> <p>3. Masih diperlukan pengujian sistem BWC mampu meningkatkan partisipasi publik dalam upaya pencegahan peredaran ilegal satwa liar.</p>	<p>1. Adanya perbaikan sistem penegakan hukum peredaran tumbuhan dan/atau satwa liar (putusan hukum, peningkatan penanganan kasus, penganggaran dll).</p> <p>2. Kasus peredaran tumbuhan dan/atau satwa liar menurun.</p>	<p>1. Data hasil investigasi Titian dan penanganan perkara telah dijadikan dasar putusan pengadilan 16 kasus kejahatan satwa liar. Adanya MoU dengan penegak Hukum (BKSDA dan BP2H LHK) telah menciptakan sinergitas penanganan kasus. Namun demikian belum dapat dikatakan bahwa terdapat perbaikan sistem penegakan hukum peredaran tumbuhan dan/atau satwa liar.</p> <p>2. Hasil investigasi Titian selama periode 2017-2019 dengan catatan 110 kasus kejadian terhadap satwa liar diantaranya: perburuan, pemeliharaan tanpa ijin, dan kepemilikan bagian dari satwa liar; hanya 16 kasus yang telah disidangkan dan mendapatkan vonis. Sulit dibuktikan bahwa kasus peredaran tumbuhan dan/atau satwa liar menurun</p>

Dari capaian 4.580 orang yang telah dilibatkan dalam pengembangan 111 produk HHBK dan 19 site ekowisata, beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

Indikator output project	Analisa capaian	Indikator intermediate outcome	Analisa capaian
<p><b>1. Potensi HHBK, pertanian/perkebunan, perikanan, jasa lingkungan memiliki rencana usaha.</b></p> <p><b>2. Produk masyarakat memiliki izin edar dan/atau izin kesehatan.</b></p> <p><b>3. Masyarakat mampu menjalankan usaha produksi.</b></p> <p><b>4. Produk masyarakat terpromosikan dan terjual secara berkala.</b></p>	<p>1. Mitra TFCA Kalimantan telah mengembangkan 111 jenis HHBK, pertanian/perkebunan, perikanan, 19 site ekowisata. Rencana usaha dikembangkan untuk beberapa produk seperti: kerupuk oleh LPHD Bumi Lestari, Kepiting oleh Konsorsium Kanopi-Lamin. Di 2021 mitra dan LPHA INTAN, PRCF, dan SIPAT mengembangkan rencana usaha Tengkawang, Ecopolibag, dan sirup/selai buah mawang. Rencana pengembangan site ekowisata di Kapuas Hulu dan Berau dalam proses fasilitasi oleh Indecon.</p> <p>2. Di perlukan dukungan TAP/fasilitator untuk memfasilitasi mitra dalam pengurusan izin edar dan keamanan pangan/produk.</p> <p>3. Masih diperlukan pendampingan untuk masyarakat agar mampu menjalankan usaha.</p> <p>4. Promosi dan penjualan berkala produk mitra masih perlu menjadi agenda penting bagi inisiatif ekonomi mitra. Sebagaimana evaluasi AKATIGA <i>engagement</i> dengan pasar menjadi pekerjaan yang perlu dan belum dikerjakan oleh mitra.</p>	<p>1. Produk masyarakat diterima oleh pasar dan/atau secara rutin diambil oleh <i>off taker</i>.</p> <p>2. Peningkatan pendapatan masyarakat dari usaha produk.</p>	<p>1. Secara umum <i>engagement</i> dengan pasar menjadi pekerjaan yang perlu dikerjakan oleh mitra, sebagaimana evaluasi AKATIGA. Dua mitra pernah memfasilitasi kerjasama dengan <i>off taker</i> seperti yang dilakukan oleh AOI dengan MoU Pusat Koperasi Madu Hutan Kapuas Hulu-PT Orindo Alam Ayu (ORIFLAME), dan Gapoktan Berkah Tuah Mandiri didampingi Gemawan dengan PT. Kirana Prima. Namun demikian kerjasama tersebut belum efektif dan perlu dievaluasi untuk pembelajaran.</p> <p>2. Pengukuran peningkatan pendapatan masyarakat dari usaha produk menjadi agenda yang perlu difasilitasi TAP/fasilitator kabupaten.</p>

Untuk capaian terjaganya simpanan karbon di 572.062,23 ha area dan pengkayaan 940,81 ha, berikut beberapa catatan analisa:

Indikator output project	Analisa capaian	Indikator intermediate outcome	Analisa capaian
<p><b>1. Perubahan lahan hutan menjadi area non hutan dapat dicegah.</b></p> <p><b>2. Perubahan kerapatan tutupan hutan dapat dicegah.</b></p> <p><b>3. Kerapatan tutupan hutan meningkat.</b></p> <p><b>4. Pencegahan kebaran hutan dan lahan.</b></p> <p><b>5. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan.</b></p> <p><b>6. Adanya nilai tambah ekonomi hutan.</b></p>	<p>1. Melalui berbagai aktifitas, mitra berupaya mencegah perubahan tutupan hutan menjadi area penggunaan non hutan. Dampak dari aktifitas mitra di Berau dalam proses divalidasi oleh konsultan penghitungan emisi.</p> <p>2. Melalui berbagai aktifitas, mitra berupaya mencegah penurunan kerapatan hutan dari aktifitas <i>encroachment</i>. Dampak dari aktifitas mitra di Berau dalam proses divalidasi oleh konsultan penghitungan emisi.</p> <p>3. Di Berau verifikasi dan validasi untuk menguji peningkatan kerapatan hutan dari intervensi mitra sedang dilakukan oleh konsultan.</p> <p>4. Masih perlu divalidasi dan verifikasi kontribusi aktifitas pencegahan kebakaran hutan dan pembelian alat untuk merespon kebaran dari mitra berkontribusi pada penanganan kebakaran hutan, seperti yang terjadi di 2019.</p> <p>5. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan seperti: patroli, identifikasi potensi hutan, agroforestri menjadi aktifitas mitra pendamping/pengelola hutan desa, yang masih berlanjut hingga 2021.</p> <p>6. Nilai ekonomi hutan yang banyak dikembangkan mitra terfokus pada HHBK dan ekowisata. Nilai ekonomi karbon hutan sedang dalam proses pengujian oleh mitra PRCF.</p>	<p>1. Simpanan karbon hutan terjaga dan/atau meningkat.</p> <p>2. Berjalannya skenario insentif karbon untuk masyarakat/lembaga pengelola.</p>	<p>1. Hasil evaluasi lingkungan AKATIGA, dengan menggunakan pendekatan <i>proxy</i>, mengestimasi 29,16 juta ton cadangan karbon telah diselamatkan dari berbagai inisiatif mitra. Sementara potensi cadangan karbon yang diciptakan dari kegiatan penanaman sebesar 84 ribu ton. Di Berau hasil ini dalam proses validasi oleh kajian konsultan emisi GRK.</p> <p>2. Skenario insentif karbon untuk LPHD dalam proses pengujian PRCF.</p>

Catatan terkait hasil perbaikan tata kelola sektor kehutanan dan perlindungan keanekaragaman hayati sejauh ini yaitu:

- a) Workshop penulisan artikel dan buku pembelajaran proyek mitra.

Indikator output project	Analisa capaian	Indikator intermediate outcome	Analisa capaian
1. Artikel hasil proyek dan/atau buku pembelajaran TFCA terkait konservasi spesies/ekosiste m/karbon dan/atau pengelolaan SDA masyarakat di publikasikan oleh media (cetak/elektronik/ media sosial).	1. Sebanyak 172 artikel terkait proyek TFCA telah dipublikasikan melalui media online dan offline. Sementara 5 buku pembelajaran telah terbit. Dari artikel yang terbit 70% isu yang diulas terkait konservasi spesies. Sementara isu yang lain seperti: ekowisata, HHBK, karst dll, masih minim. Diperlukan perimbangan isu publikasi terutama terkait ekonomi untuk mempromosikan proyek ekonomi mitra. Terkait dengan buku pembelajaran belum ada buku baru di 2021.  2. Stakeholder mendapatkan informasi substansi terkait artikel dan/atau buku pembelajaran.	1. Isu terkait proyek menjadi perhatian publik dan para pihak termasuk pengambil kebijakan.  2. Artikel/buku pembelajaran terkait proyek menjadi dasar bagi proses pengambilan keputusan terkait kebijakan.	1. Isu terkait konservasi spesies mudah menarik perhatian publik dan pengambil kebijakan. Sementara isu lainnya seperti: HHBK, ekowisata, mangrove masih perlu disebarluaskan ke publik dan pengambil kebijakan.  2. Diseminasi pembelajaran perlu menjadi agenda reguler administrator dalam mempromosikan hasil mitra.
	2. Satu buku pembelajaran Titian telah didiseminasikan kepada stakeholder terkait di tingkat Provinsi dan Nasional.		

- b) Pembuatan film pembelajaran proyek mitra.

Indikator output project	Analisa capaian	Indikator intermediate outcome	Analisa capaian
1. Film pembelajaran TFCA terkait konservasi spesies/ekosistem/karbon dan/atau pengelolaan SDA masyarakat di publikasikan oleh media (televisi/media sosial).	1. Dua film pembelajaran proyek dari KSK UGM dan YRJAN telah tersedia. Diperlukan strategi promosi ke pengambil kebijakan dan publik luas.	1. Film terkait proyek menjadi perhatian publik dan para pihak termasuk pengambil kebijakan.	1. Diseminasi film pembelajaran mitra ke stakeholder perlu menjadi agenda reguler administrator.
2. Stakeholder mendapatkan informasi substansi terkait film pembelajaran.	2. TAP/fasilitator kabupaten perlu memfasilitasi penyusunan film pembelajaran proyek mitra siklus 5.	2. Film pembelajaran terkait proyek menjadi dasar bagi proses pengambilan keputusan terkait kebijakan.	

c) Pelatihan terkait implementasi proyek

Indikator output project	Analisa capaian	Indikator intermediate outcome	Analisa capaian
1. Adanya peningkatan kapasitas (skill dan pengetahuan) masyarakat dan para pihak, terkait teknis proyek.	1. Sebanyak 136.509 orang dan 158 kelompok masyarakat meningkat/menguat kapasitasnya melalui pendampingan dan berbagai pelatihan/ workshop/seminar baik langsung maupun daring. Workshop/pelatihan yang dikerjakan di antaranya: pemantauan rangkong dan pesut, pelatihan kepemanduan wisata dan hospitality, serta pelatihan pembibitan vegetatif/agroforestri.	1. Pengetahuan dan ketrampilan teknis terkait proyek diimplementasikan. 2. Adanya perubahan pengelolaan SDA menjadi lebih baik. 3. Mitra TFCA mampu melakukan pengelolaan proyek sesuai standar TFCA Kalimantan.	1. Pengetahuan teknis terkait proyek seperti teknik pemantauan rangkong dan pesut, pelatihan pembibitan vegetatif/agroforestri diaplikasikan oleh masyarakat.  2. Hasil evaluasi AKATIGA menunjukkan bahwa intervensi mitra berkontribusi positif seperti: kasus PRCF dan JALA, nilai-nilai konservasi yang diterima oleh masyarakat terwujud dalam upaya perlindungan kawasan, dan ditularkan kepada anggota masyarakat lainnya.
2. Adanya peningkatan kapasitas mitra TFCA (skill dan pengetahuan) dalam pengelolaan proyek	2. 67 mitra proyek telah dilakukan pedampingan pengelolaan proyek sebagaimana standar TFCA Kalimantan, dengan 32 proyek saat ini masih dilakukan pendampingan melalui siklus 5.		3. 67 mitra proyek telah dilakukan pendampingan pengelolaan proyek sebagaimana standar TFCA Kalimantan, dengan 32 proyek saat ini masih dilakukan pendampingan melalui siklus 5.

d) Fasilitasi pertemuan penyusunan dan/atau diskusi para pihak terkait SRAK spesies/RPJMkam/Perkam/Perkakam/Perda/Juknis/Naskah Paper/Masterplan Pengelolaan Spesies/Ekosistem dll.

Indikator output project	Analisa capaian	Indikator intermediate outcome	Analisa capaian
1. Adanya kesepakatan para pihak terkait usulan kebijakan.	1. Dalam pelaksanaan proyek, mitra memfasilitasi 164 penyusunan/penyempurnaan kebijakan baru/ operasionalisasi kebijakan baik di tingkat desa, kabupaten, provinsi, dan kementerian.	1. Usulan kebijakan dapat dilegalisasi dan menjadi landasan operasional pengelolaan SDA.	1. Dari 164 kebijakan yang diterbitkan/disempurnakan masih diperlukan peranan TAP/fasilitator untuk memantau operasionalisasinya. Khusus untuk kebijakan di tingkat desa/kampung, evaluator AKATIGA; kebijakan tersebut memperkuat posisi upaya pengelolaan sumber daya dan kawasan di lingkup desa. Khusus terkait konservasi spesies terdapat indikasi kuat.
2. Legalisasi kebijakan yang diusulkan.			





# NUGERAHAN KALPARTARU TAH



Damianus Nadu Pengelola hutan adat Pikul, Bengkayang merupakan Desa binaan INTAN, menerima Penghargaan Kalpataru 2021 kategori Perintis Lingkungan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta

## VI. DINAMIKA, TANTANGAN, DAN STRATEGI INTERVENSI

Belum adanya kesepakatan *governance* TFCA Kalimantan pasca berakhirnya masa keanggotaan KLHK dan mundurnya WWF menjadi persoalan utama di 2021 dan akan berlanjut di 2022. Pembahasan terkait hal tersebut akan intensif di 2022 dan menjadi agenda kerja penting TFCA Kalimantan. Beberapa isu yang perlu disepakati di antaranya keterlibatan kembali KLHK dalam Dewan Pengawas TFCA Kalimantan, fokus program untuk sisa dana hibah, dan time frame berakhirnya TFCA Kalimantan.

Pandemi Covid 19 masih menjadi tantangan di 2021 dan masih akan terjadi di 2022. Tidak hanya berimplikasi pada keleluasaan pelaksanaan program dan proyek, tetapi juga pada tata waktu dan penyerapan anggaran. Di tingkat tapak, mitra PLAB mengusulkan pemberhentian proyek karena Pandemi Covid di Kampung Merasa yang menyebabkan proyek tidak bisa berjalan dengan baik. Namun demikian administrator masih menyarankan untuk melihat situasi dalam beberapa bulan kedepan. Di 2021 administrator kembali memberikan dukungan untuk penanganan Covid 19 berupa bahan makanan dan peralatan kesehatan untuk Kampung Merasa dan Merabu di Berau, serta korban banjir di Sintang, Kalimantan Barat. Alokasi dukungan Covid 19, akan tetap menjadi bagian dari rencana kerja administrator di 2022.

Kelemahan kapasitas mitra dalam penyusunan laporan reguler teknis dan keuangan termasuk menyusun RKT PMP dan penyesuaianya, serta kelemahan dalam menata aktifitas proyek, masih menjadi persoalan mendasar yang perlu dikuatkan. Dengan demikian pendampingan oleh Pokja PKHB kepada mitra di 2022 akan dilanjutkan. Tidak berjalannya Konsorsium Konphalindo-DIAL dan pengunduran diri fasilitator Kutai Barat dan Mahakam Ulu sejak bulan Agustus, akan dilakukan penggantian agar proses fasilitatif 3 LPHD dan 1 KSM dapat dilanjutkan. Sementara pendampingan di luar kabupaten sasaran yang kosong perlu dilakukan oleh fasilitator/TAP memperhatikan saran Direktur TFCA Pusat Scott Lampman agar administrator tidak melakukan hal-hal di luar kewenangan dan menghindari konflik kepentingan antara Kehati sebagai administrator dan TAP sebagai pendamping. Proses kontrak TAP/fasilitator untuk Kabupaten Berau, Kutai Barat, Mahakam Ulu dan kabupaten di luar sasaran akan menjadi agenda administrator di 2022.



Dukungan penyaluran bantuan sembako ke kampung Merabu  
yang terdampak pandemik covid 19, Berau, Kaltim

Pengembangan usaha menjadi bagian dari aktifitas yang melekat pada proyek mitra. Di 2022, semua LPHD siklus 5 akan memulai penyusunan rencana usaha yang didahului dari identifikasi potensi. Dalam pembekalan mitra saat finalisasi proposal siklus 5, cara penyusunan rencana usaha merujuk Juknis Pendampingan PS Pasca Ijin PSKL seri 1 telah disampaikan. Namun demikian dari beberapa rencana usaha mitra yang dikirimkan ke administrator belum baik terutama informasi rinci potensi HHBK sebagai dasar penyusunan rencana usaha yang belum ada. Di 2022 perlu dilakukan penguatan kapasitas mitra dalam pengembangan usaha termasuk penyusunan rencana usaha. Rencana diskusi pengembangan usaha ekonomi sebagaimana saran tim teknis yang belum terlaksana di 2021, akan dilakukan di 2022.

Kuantifikasi dampak konservasi hutan dan ekosistem oleh mitra dalam capaian penurunan emisi pada tingkat Kabupaten Berau, menjadi pekerjaan yang belum selesai di 2021 dan akan dilanjutkan di 2022. Pasca kegiatan pengukuran, diseminasi informasi hasil ke para pemangku kepentingan dan peningkatan kapasitas stakeholder serta mitra dalam melakukan pengukuran sendiri dirasakan penting dilakukan. Aktifitas tersebut direncanakan dilakukan di 2022, termasuk mempertimbangkan pelaksanaan pengukuran yang sama di kabupaten sasaran TFCA Kalimantan lainnya.

Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Kajian DDTLH di kabupaten sasaran TFCA Kalimantan oleh P3E Kalimantan belum dapat diselesaikan hingga Desember 2021. Kendala penyediaan dan perolehan data, serta pengolahan data terutama data spasial menjadi kendala terbesar selama penyusunan kajian. Di akhir tahun 2021, P3E mengundang para pihak termasuk TFCA Kalimantan dalam rapat evaluasi penyusunan kajian dan diskusi rencana kelanjutan pekerjaan di 2022. Agenda 2022 di antaranya yaitu finalisasi penghitungan data, finalisasi dokumen, konsultasi publik, dan penandatanganan dokumen oleh Bupati. TFCA Kalimantan akan melanjutkan dukungan P3E dalam finalisasi dokumen di tahun 2022.

Kelengkapan perangkat administratif berupa Juknis dan/atau SOP untuk memfasilitasi penyaluran hibah mitra, pelaksanaan audit, addendum kontrak dan pemberhentian kontak/penutupan PPH dirasakan penting ada untuk memudahkan proses pelaksanaan program. Kebutuhan kedetailan petunjuk untuk memfasilitasi mitra seperti: petunjuk untuk penyesuaian/redesain proyek, pemilihan auditor yang kompeten dan independen, penanganan *fraud* keuangan, serta mekanisme penutupan hibah di luar *time frame* proyek menjadi kebutuhan mendesak yang perlu ada mengingat persoalan tersebut telah dirasakan administrator mengambil porsi waktu kerja yang panjang dan pengambilan keputusan yang berlaku. Agenda penyusunan perangkat tersebut diagendakan di 2022, bersamaan dengan revisi Panduan Penyaluran Hibah TFCA Kalimantan yang proses pembaharuanya sempat tertunda.

Proses penutupan hibah beberapa mitra di 2021 mengalami kendala terkait belum selesainya audit proyek. Proses audit terutama mitra hibah skala kecil yang sudah dilakukan di akhir tahun akan dilanjutkan hingga Januari 2022 dan setelahnya akan dilakukan GCR. Di 2022, untuk menghindari ketidakpastian waktu audit, tata waktu audit untuk mitra hibah reguler akan diperketat oleh fasilitator dan TAP dengan demikian GCR tidak terkendala oleh proses audit. Sedikitnya ditargetkan 7 GCR mitra siklus 4 akan dilakukan di 2022 yaitu: Kompakh, Konsorsium KANOPI-Lamin Segawi, Perangat Timbatu, Makmur Jaya II, Kerima Puri, FORLIKA, dan JALA. Sementara 3 GRC mitra siklus 5 yang akan diproses yaitu: Konphalindo, Gapoktanahut Lestari Gunung Selatan, dan Kelapeh.



Pengambilan data titik koordinat di area pengusulan KKP3K Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur 61



Area lahan pembibitan tanaman sayuran di Desa Nusa Poring, Melawi, Kalimantan Barat

## VII. RENCANA KERJA 2022

Di awal Desember, administrator dan fasilitator melaksanakan evaluasi tahunan dan diskusi rencana kerja 2022. Kategori perencanaan mengikuti kerangka yang sudah ditetapkan tahun sebelumnya yaitu: *governance*, administrasi mitra, dan pemantauan-evaluasi.

Beberapa rencana kerja di 2022 akan melanjutkan agenda di 2021 di antaranya: koordinasi dan konsultasi secara intensif bersama Dewan Pengawas terkait *governance* dan kelanjutan TFCA Kalimantan, dukungan administrasi hibah dan pendampingan mitra siklus 5, finalisasi audit dan GCR 6 mitra siklus 4, melanjutkan dukungan Kajian DDTLH oleh P3E Kalimantan, kelanjutan proses kajian penghitungan kontribusi mitra di Berau pada target penurunan emisi GRK PKHB, dukungan untuk tim KSK UGM dalam fasilitasi pengusulan Geopark (Taman Bumi), dan pengadaan TAP/Fasilitator Kabupaten. Untuk mengimplementasikan rencana kerja tersebut, usulan ME 2022 yang diajukan administrator dan telah disetujui dewan pengawas sebesar Rp7.354.135.465 Miliar. Detail rencana kerja sebagaimana Tabel 6

Tabel 6. Rencana Kerja Administrator TFCA Kalimantan 2022

No	Kategori/Kriteria/Aktifitas	Tata Waktu												Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	<b>Tata Kelola (<i>Governance</i>)</b>													<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan dan pelaporan</li> <li>• Koordinasi/ Konsultasi</li> <li>• Penguatan kapasitas administrator dan faskab</li> <li>• Professional Service</li> <li>• TAP Berau</li> <li>• Komunikasi dan Publikasi</li> </ul>
2.	<b>Administrasi Hibah</b>													<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan /Penguatan Kapasitas 33 mitra</li> <li>• Penyaluran Hibah</li> <li>• Laporan penutupan hibah</li> <li>• Addendum PPH tanpa penambahan biaya</li> </ul>
3	<b>Pemantauan dan Evaluasi</b>													<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan dan Evaluasi</li> </ul>

Penyempurnaan SOP hibah, review dan verifikasi laporan, KAK pemantauan dan evaluasi di tahun 2022, serta kunjungan ke lapangan (administrator/fasilitator/TAP/Dewan Pengawas)



Pertemuan dan bincang-bincang Damianus Nadu dan Demanhuri (INTAN) dengan Direksi dan staf KEHATI,64 paska penerima penghargaan kapataru di Kantor KEHATI, Jakarta





Jalan: Bangka VII No. 3B, Pela Mampang, Jakarta Selatan- Indonesia 12720  
Ph: +62 21 718 3185 | +62 21 718 3187